



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1331 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FIRMAN RACHMAN** ;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Januari 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Mapia No.13 Dok V Atas, Jayapura ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : PNS (mantan Bendahara Pengeluaran pada Kejari Wamena) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 ;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 ;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi: sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014 ;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 ;

Hal. 1 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1231/2015/S.358.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 06 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1232/2015/S.358.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 06 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 April 2015;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2156/2015/S.358.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Juni 2015;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2157/2015/S.358.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Juli 2015;

yang diajukan di muka Persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FIRMAN RACHMAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Kejaksaan Negeri Wamena berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena Nomor : KEP-36/T.1.16/Cu.3/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 dan berdasarkan Surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena Nomor : KEP-/T.1.16/Cu.3/01/2013 tanggal 3 Januari 2013, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan I PUTU SUARJANA, SH, MH Kepala Kejaksaan Negeri Wamena berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-347/JA/05201 tanggal 22 Mei 2012 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Desember 2012 dan pada bulan Januari sampai dengan bulan September 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012 dan tahun 2013 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Wamena Jalan A. Yani No. 25, Wamena atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

Hal. 2 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 terdapat anggaran yang dikelola oleh Kejaksaan Negeri Wamena sebesar Rp3.591.199.000,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2012 Nomor : 0453/006-01.2.01/30/2012 dan untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp3.942.049.000,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat puluh sembilan ribu rupiah) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2013 Nomor : DIPA-006.01.2.008991/2013 yang kedua anggaran tersebut bersumber dari APBN;
2. Bahwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wamena berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-347/JA/05201 tanggal 22 Mei 2012 telah mengeluarkan Surat keputusan Nomor KEP-27/T.1.16/Cu.3/07/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dan Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dengan susunan :

No	Nama	Jabatan
1.	I PUTU SUARJANA, SH, MH/ Kepala Kejaksaan Negeri Wamena	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	I PUTU SUARJANA, SH, MH/ Kepala Kejaksaan Negeri Wamena	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	ARIUS ABAMI, SH/Kasubagbin Kejari Wamena	Pejabat Penanda Tangan SPM
4.	SHELLY A. PEETOM, SH/Staf Pembinaan	Bendahara Pengeluaran
5.	FIRMAN RACHMAN/Staf Pidum	Bendahara Penerimaan
6.	HEIN JIMI ANSANAY/ Staf Pidum	Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

3. Bahwa berawal pada bulan Nopember 2012 I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wamena dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan SHALLY A PEETOOM selaku bendahara Pengeluaran Kejari Wamena untuk membuat Tambahan Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persediaan (TUP) sebesar Rp1.040.650.000,00 (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tahun 2012 I PUTU SUARJANA, SH, MH telah membuat surat yaitu :

(1) Surat Nomor B-1051/T.1.16/Cu.3/11/2012 tanggal 19 November 2012 perihal Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp1.040.650.000,00 (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditandatangani oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH dan surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah XXX Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara di Jayapura;

(2) Surat Pernyataan tanggal 19 November 2012 atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Wamena yang ditanda tangani oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH yang isinya :

a. Bahwa dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan digunakan untuk keperluan yang sifatnya mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D;

b. Bahwa apabila terdapat dana sisa dana TUP akan disetorkan ke rekening Kas Negara;

c. Bahwa dana TUP tidak untuk membiayaan pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung;

(3) Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp1.040.650.000,00 (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan yang intinya sebagai berikut:

No.	Uraian Program/Kegiatan	Nilai (Rp)
1.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	
	Honor Operasional Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Satker	15.400.000,00
	Sub Jumlah 1	15.400.000,00
2.	Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen	
	Penyelidikan Tertutup (Surveillance)	20.090.000,00
	Penyuluhan Hukum pada Kejari Wamena	3.490.000,00
	Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN	81.500.000,00
	Sub Jumlah 2	105.080.000,00
3.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pidana Umum	
	Pra Penuntutan Perkara Pidana Umum pada Kejari Wamena	58.250.000,00
	Penuntutan Perkara Pidana Umum pada Kejari Wamena	398.300.000,00
	Sub Jumlah 3	456.550.000,00
4.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	
	Penyidikan Perkara Korupsi	157.080.000,00
	Pra Penuntutan Perkara Korupsi	16.400.000,00
	Penuntutan Perkara Korupsi	28.140.000,00
	Pra Penuntutan Perkara Khusus	22.800.000,00
	Penuntutan Perkara Khusus	99.960.000,00
	Persidangan Perkara Tipikor	139.240.000,00
	Sub Jumlah 4	463.620.000,00
	Jumlah	1.040.650.000,00

5. Bahwa setelah surat pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tahun 2012 yang diajukan I PUTU SUARJANA, SH, MH tersebut kemudian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua mengeluarkan Surat Nomor: S-2593/WPB.33/BD.0301/2012 tanggal 22 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Negeri Wamena hal Permintaan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp1.040.650.000,00 (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa selanjutnya ARIUS ABAMI, SH selaku Kasubagbin Kejaksaan Negeri Wamena dan selaku Pejabat Penandatanganan SPM menandatangani SPM Dana UP (UYHD)/Tambahan Uang Persediaan Nomor 00092/KEJAKSAAN-UP/2012 tanggal 22 Nopember 2012 untuk penyediaan tambahan uang persediaan untuk satuan kerja Kejaksaan Negeri Wamena sebesar Rp1.040.650.000,00 (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa berdasarkan SPM Nomor 00092/KEJAKSAAN-UP/2012 tanggal 22 November 2012, selanjutnya KPPN Wamena selaku Kuasa Bendahara

Hal. 5 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Negara (BUN) melakukan pemindahbukuan ke rekening bank BRI Cabang Wamena nomor 0311 01 000060 308 atas nama Kejaksaan Negeri Wamena dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 925309Z/113/111 tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp1.040.650.000,00 (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana tersebut masuk ke rekening bank BRI Cabang Wamena nomor 0311 01 000060 308 atas nama Kejaksaan Negeri Wamena;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2012, SHALLY A PEETOOM dan I PUTU SUARJANA, SH, MH menandatangani cek nomor CET 397944 senilai Rp1.042.836.100 (termasuk dana untuk belanja pegawai sebesar Rp2.186.100), dan uangnya pada tanggal 7 Desember 2012 telah diambil oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama dengan Terdakwa FIRMAN RACHMAN, sehingga SHALLY A PEETOOM mengajukan pengunduran diri selaku bendahara Pengeluaran maka I PUTU SUARJANA, SH, MH mengangkat Terdakwa FIRMAN RACHMAN selaku bendahara Pengeluaran dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena Nomor : KEP-36/T.1.16/Cu.3/12/2012 tanggal 10 Desember 2012;
9. Bahwa pada saat uang sebesar Rp1.042.836.100 dicairkan lalu sebagian telah ditransfer ke rekening BRI nomor 030701044490508 atas nama I PUTU SUARJANA, SH, MH;
10. Bahwa I PUTU SUARJANA, SH, MH setelah mencairkan uang sebesar Rp1.042.836.100 langsung memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) kepada Terdakwa FIRMAN RACHMAN sambil mengatakan "kamu ambil uang ini untuk pakai belajar membuat Ganti Uang Nihil (GU Nihil) di Kejaksaan Tinggi Papua dan setelah itu kamu kembali untuk membuat GU Nihil untuk mempertanggung jawabkan uang Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah) yang sudah kita ambil menggunakan TUP tersebut "sehingga pada tanggal 08 Desember 2012 Terdakwa FIRMAN RACHMAN berangkat ke Jayapura untuk belajar membuat GU Nihil di Kejaksaan Tinggi Papua dengan dibimbing oleh HAMZA FARUUK Kabag Keuangan Kejaksaan Tinggi Papua;
11. Bahwa Dari pencairan dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp1.040.650.000,00 oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama dengan Terdakwa FIRMAN RACHMAN sebesar Rp127.194.005,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh empat ribu lima rupiah) telah digunakan dengan rincian :

Hal. 6 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya operasional pelaksanaan penanganan perkara pidana umum sebelum bulan Desember 2012 diserahkan kepada para jaksa sebesar Rp96.000.000,00 dengan Rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	JUMAH (Rp)
1	2	3	4
1.	FRANSINKA L WONMALY, SH	Kasi Pidsus	Rp18.900.000,00
2.	FRANSINKA L WONMALY, SH	Kasi Pidsus	Rp15.000.000,00
3.	VALLERIANUS CD SAWAKI, SH	Jaksa Fungsional	Rp16.200.000,00
4.	TEGUH BASUKI HERU YUWONO	Kasi Pidum	Rp9.900.000,00
5.	FILEMON KETAREN, SH	Kasi Datun	Rp30.600.000,00
6.	YUDHA SIAHAAN, SH	Kasi Intelijen	Rp5.400.000,00
		Jumah	Rp96.000.000,00

2. Pembayaran Honor Operasional Pengelolaan Keuangan Satker Kejaksaan Negeri Wamena dan penyeteran pajak (PPN, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 22) periode September sampai dengan Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA/JABATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	I PUTU SUARJANA, SH, MH / KPA	Rp3.400.000,00
2.	SHALLY A PEETOOM, SG/Bendahara Pengeluaran	Rp2.400.000,00
3.	FIRMAN RACHMAN / Bendahara Penerima	Rp1.200.000,00
4.	HEIN ANSANAY/Pembuat Daftar Gaji	Rp1.800.000,00
5.	Penyeteran Pajak-pajak	Rp22.394.005,00
	Jumlah	Rp.31.194.005,00

12. Bahwa Terdakwa FIRMAN RACHMAN untuk mempertanggung jawabkan uang sebesar Rp1.040.650.000,00 dengan cara membuat Ganti uang (GU) nihil sebagai Pertanggung jawaban yaitu menggunakan SPM Nihil yang dibuat seolah-olah uang yang telah diambil dengan mekanisme TUP sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah) telah digunakan sesuai dengan Rincian Penggunaan Dana yang di buat pada saat pengajuan TUP, dimana pembuatan SPM nihil tersebut sudah disampaikan Terdakwa FIRMAN RACHMAN kepada I PUTU SUARJANA, SH, MH bahwa "ini uang tidak bisa digunakan karena tidak ada pertanggung jawabannya" namun dijawab oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH "buat saja pertanggung jawab ke

Hal. 7 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPN dengan SPM Nihil nanti buktinya kita pertanggung jawabkan pelan-pelan” dan bukti-bukti tersebut tidak pernah ada;

13. Bahwa selain Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp1.040.650.000,00 (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) I PUTU SUARJANA, SH, MH telah menyuruh SHELLY PETOOM selaku bendahara untuk mengajukan Ganti UP untuk Penggantian Uang Persediaan keperluan Belanja Barang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu SHELLY PETOOM membuat SPM Ganti UP untuk Penggantian Uang Persediaan keperluan Belanja Barang sebesar Rp40.000.000,00 dan ditandatangani oleh ARIUS ABAMI, SH Nomor 00096/GU/KEJAKSAAN WMN/2012 tanggal 5 Desember 2012 selanjutnya KPPN Wamena melakukan pemindahbukuan ke Rekening Bank BRI Cabang Wamena nomor 0311 01 000060 308 atas nama Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Wamena dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 925539Z/113/111 tanggal 6 Desember 2012 sebesar Rp40.000.000,00 untuk penggantian uang persediaan satuan kerja Kejaksaan Negeri Wamena;
14. Bahwa rencana penggunaan dana sebesar Rp40.000.000,00 adalah untuk kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Program/Kegiatan	Nilai (Rp)
1.	Belanja Keperluan Perkantoran	12.129.000,00
2.	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.000.000,00
3.	Belanja Langganan Listrik	500.000,00
4.	Belanja Langganan Telepon	4.261.000,00
5.	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.510.000,00
6.	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
	Jumlah	40.000.000,00

15. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012, I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama dengan Terdakwa FIRMAN RACHMAN melakukan penarikan tunai dana untuk Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dari rekening milik Kejaksaan Negeri Wamena di BRI Cabang Wamena dengan menggunakan cek nomor CET 397944 sebesar Rp69.308.550,00 termasuk penarikan tunai untuk Belanja Pegawai Kejaksaan Negeri Wamena bulan Desember sebesar Rp29.308.550,00

Hal. 8 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun uang Rp40.000.000,00 setelah cair dipegang semua oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH;

16. Bahwa khusus untuk dana GU sebesar Rp40.000.000,00 pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

No.	Uraian Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Pengiriman Pos Giro	47.970,00
2.	Biaya Pengadaan ATK – Fotocopy	144.600
3.	Biaya Telepon	1.013.940,00
4.	Biaya Operasional (BBM) Kendaraan Dinas Roda 4	1.000.000,00
5.	Operasional Lainnya (perjalanan dinas bendahara)	5.000.000,00
Jumlah		7.206.510,00

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa FIRMAN RACHMAN membuat SPM untuk pertanggungjawaban TUP Desember 2012 sebesar Rp1.040.650.000,00 dan Ganti Uang (GU) sebesar Rp40.000.000,00 yang ditandatangani ARIUS ABAMI, SH tanggal 31 Desember 2013 berikut dengan SP2D yang di buat oleh KPPN Wamena dengan rincian sebagai berikut :

No	Pertanggungjawaban KPA		Pengesahan dari KPPN		Nilai (Rp)
	SPM TUP/GUP (Nihil)		SP2D TUP/GUP (Nihil)		
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
I.	Pertanggungjawaban dan Pengesahan TUP Nihil Rp1.002.770.000,00				
1.	00095	31 Des 2012	926277Z/113/109	31 Des 2012	148.000.000,00
2.	00098	31 Des 2012	926261Z/113/109	31 Des 2012	15.400.000,00
3.	00099	31 Des 2012	926262Z/113/109	31 Des 2012	58.250.000,00
4.	00100	31 Des 2012	926268Z/113/109	31 Des 2012	99.960.000,00
5.	00101	31 Des 2012	926269Z/113/109	31 Des 2012	28.140.000,00
6.	00102	31 Des 2012	926263Z/113/109	31 Des 2012	22.800.000,00
7.	00103	31 Des 2012	926271Z/113/109	31 Des 2012	16.400.000,00
8.	00104	31 Des 2012	926264Z/113/109	31 Des 2012	152.300.000,00
9.	00105	31 Des 2012	926265Z/113/109	31 Des 2012	246.000.000,00
10.	00106	31 Des 2012	926266Z/113/109	31 Des 2012	84.990.000,00
11.	00107	31 Des 2012	926270Z/113/109	31 Des 2012	20.090.000,00
12.	00108	31 Des 2012	926267Z/113/109	31 Des 2012	110.440.000,00
	Sub Jumlah I				1.002.770.000,00
II.	Pertanggungjawaban dan Pengesahan GU (Nihil) Rp40.000.000,00				
1.	00109	31 Des 2012	926272Z/113/109	31 Des 2012	40.000.000,00
	Jumlah Pertanggungjawaban dan Pengesahan TUP/GU (Nihil)				1.042.770.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa I PUTU SUARJANA, SH, MH memerintahkan Terdakwa FIRMAN RACHMAN untuk membuat 12 (dua belas) SPM TUP/GUP (Nihil) tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp1.002.770.000,00 dan 1 (satu) SPM GU (Nihil) tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp40.000.000,00 padahal tidak ada kegiatannya dengan berkata "Man tolong bantu untuk membuat pertanggungjawaban berupa GUP Nihil dan UP Nihil berkoordinasi dengan pak HAMZAH karena sampai batas waktu yang ditentukan bisa jadi uang dikembalikan " ;
19. Bahwa dana TUP Desember 2012 sebesar Rp1.040.650.000,00 dan dana Ganti Uang (GU) sebesar Rp40.000.000,00 tidak pernah dilaksanakan atau tidak ada kegiatannya dan uangnya dipegang semua oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH;
20. Bahwa terhadap penerbitan SPM Pertanggungjawaban GUP (Nihil) bulan Desember 2012 sebesar Rp1.042.770.000,00 I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Terdakwa FIRMAN RACHMAN selaku Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Wamena telah menandatangani 21 (dua puluh satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), yang mna SPTB tersebut dibuat seolah-olah kegiatannya ada dan sudah selesai, namun faktanya tidak ada sama sekali, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SPTB	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	SPTB-02/T.1.16/Cu.3/12/2012	15.400.000,00	SPM Nomor 00098
2.	SPTB-03/T.1.16/Cu.3/12/2012	20.090.000,00	SPM Nomor 00107
3.	SPTB-04/T.1.16/Cu.3/12/2012	3.490.000,00	SPM Nomor 00106
4.	SPTB-05/T.1.16/Cu.3/12/2012	81.500.000,00	SPM Nomor 00106
5.	SPTB-06/T.1.16/Cu.3/12/2012	152.300.000,00	SPM Nomor 00104
6.	SPTB-07/T.1.16/Cu.3/12/2012	2.400.000,00	SPM Nomor 00103
7.	SPTB-08/T.1.16/Cu.3/12/2012	14.000.000,00	SPM Nomor 00103
8.	SPTB-09/T.1.16/Cu.3/12/2012	1.800.000,00	SPM Nomor 00102
9.	SPTB-10/T.1.16/Cu.3/12/2012	21.000.000,00	SPM Nomor 00102
10.	SPTB-11/T.1.16/Cu.3/12/2012	58.250.000,00	SPM Nomor 00099
11.	SPTB-12/T.1.16/Cu.3/12/2012	6.000.000,00	SPM Nomor 00101
12.	SPTB-13/T.1.16/Cu.3/12/2012	22.140.000,00	SPM Nomor 00101
13.	SPTB-14/T.1.16/Cu.3/12/2012	246.000.000,00	SPM Nomor 00105
14.	SPTB-15/T.1.16/Cu.3/12/2012	27.000.000,00	SPM Nomor 00100
15.	SPTB-16/T.1.16/Cu.3/12/2012	72.960.000,00	SPM Nomor 00100
No	Nomor SPTB	Jumlah (Rp)	Keterangan
16.	SPTB-17/T.1.16/Cu.3/12/2012	110.440.000,00	SPM Nomor 00108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	SPTB-18/T.1.16/Cu.3/12/2012	13.300.000,00	SPM Nomor 00095
18.	SPTB-19/T.1.16/Cu.3/12/2012	134.700.000,00	SPM Nomor 00095
	Sub Jumlah 1	1.002.770.000,00	
1.	SPTB-20/T.1.16/Cu.3/12/2012	21.129.000,00	SPM Nomor 00109
2.	SPTB-20/T.1.16/Cu.3/12/2012	1.514.000,00	SPM Nomor 00109
3.	SPTB-21/T.1.16/Cu.3/12/2012	17.357.000,00	SPM Nomor 00109
	Sub Jumlah 2	40.000.000,00	
	Jumlah	1.042.770.000,00	

Sehingga dari pencairan dan penggunaan dana anggaran Kejaksaan Negeri Wamena periode bulan Desember 2012 adalah sebagai berikut:

1). Pencarian dan Pengembalian Dana Sisa TUP bulan Desember 2012:

1. Surat Perintah Perincian Dana TUP Rp1.040.650.000,00;
 2. Surat Perintah Perincian Dana TUP Rp 40.000.000,00;
 3. Surat Setoran Bukan Pajak Sisa TUP Rp 37.880.000,00;
- J u m l a h Rp1.042.770.000,00;

2). Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan:

1. Biaya operasional perkara pidana umum Rp96.000.000,00;
 2. Biaya Honorarium 4 (empat) bulan Rp 8.800.000,00;
 3. Biaya BBM kendaraan roda 4 dua unit Rp 1.000.000,00;
 4. Biaya telepon kantor Rp 1.013.940,00;
 5. Biaya pengadaan ATK-foto copy Rp 144.600;
 6. Biaya pengiriman pos dan giro Rp 47.970,00;
 7. Penyetoran pajak-pajak Rp22.394.005,00;
 8. Biaya operasional lainnya Rp 5.000.000,00;
- J u m l a h Rp.134.400.000,00;

3). Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp908.369.000,00;

21. Bahwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wamena mengeluarkan Surat keputusan Nomor KEP- /T.1.16/Cu.3/01/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dan Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dengan susunan :

No	Nama	Jabatan
1.	I PUTU SUARJANA, SH, MH/ Kepala Kejaksaan Negeri Wamena	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	I PUTU SUARJANA, SH, MH/ Kepala Kejaksaan Negeri Wamena	Pejabat Pembuat Komitmen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	ARIUS ABAMI, SH/Kasubagbin Kejari Wamena	Pejabat Penanda Tangan SPM
4.	FIRMAN RACHMAN/Staf Pidum	Bendahara Pengeluaran
5.	SHELLY A. PEETOM, SH/Staf Pembinaan	Bendahara Penerimaan
6.	HEIN JIMI ANSANAY/ Staf Pidum	Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

22. Bahwa pada Tahun anggaran 2013 telah dilakukan pencairan dana anggaran kejaksaan Negeri Wamena sebesar Rp 2.509.810.200 (dua milyar lima ratus Sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) secara bertahap dalam periode Januari 2013 sampai dengan bulan September 2013 berupa Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan. Ganti Uang dan dana Langsung dengan rincian sebagai berikut :

A. Pencairan Uang Persediaan sebesar Rp.100.000.000,00 Tahun 2013

- Bahwa bulan Januari 2013 Terdakwa FIRMAN RACHMAN mengajukan pencairan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Belanja Barang, dengan cara membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dana UP Nomor : 00005/KEJAKSAAN-UP/2013 tanggal 30 Januari 2013, dan setelah ditanda tangani oleh ARIUS ABAMI, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) untuk penyediaan uang persediaan satuan kerja Kejaksaan Negeri Wamena, selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 927129Z/113/110 tanggal 31 Januari 2013, dan atas dasar SP2D tersebut pada tanggal 1 Februari 2013, I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama dengan Terdakwa FIRMAN RACHMAN menandatangani cek nomor CET 397949 untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp.100.000.000,00 dan uang tersebut diserahkan kepada I PUTU SUARJANA, SH, MH dan sebesar Rp40.000.000,00 dikembalikan lagi kepada Terdakwa FIRMAN RACHMAN untuk keperluan perkantoran seperti bayar listrik bulan Januari, ATK dan biaya yang tidak terduga dimana kadang kala I PUTU SUARJANA, SH, MH sering meminta uang dari Terdakwa FIRMAN RACHMAN;
- Bahwa atas pencairan tersebut selanjutnya Arius Abami, SH menandatangani 3 (tiga) buah SPM Ganti Uang Persediaan Nihil yang ditujukan ke KPPN Wamena, dan berdasarkan SPM Ganti UP Nihil tersebut, KPPN Wamena menerbitkan 3 (tiga) buah SP2D pengesahan

Hal. 12 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertanggungjawaban uang persediaan sebesar Rp100.000.000,00
untuk keperluan belanja barang sebagai berikut:

No	Pertanggungjawaban		Pengesahan dari KPPN		Nilai (Rp)
	SPM Ganti UP (Nihil)		SP2D Ganti UP (Nihil)		
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1.	00069	05-12-2013	931870Z/113/109	06-12-2013	28.200.000,00
2.	00070	05-12-2013	931871Z/113/109	06-12-2013	1.350.000,00
3.	00071	05-12-2013	931872Z/113/109	06-12-2013	70.450.000,00
Jumlah					100.000.000,00

B. Pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp787.700.000,00, Tahun 2013.

- Bahwa pada bulan Maret 2013 I PUTU SUARJANA, SH, MH memerintahkan Terdakwa FIRMAN RACHMAN untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp787.700.000,00, lalu Terdakwa FIRMAN RACHMAN membuat dokumen-dokumen berupa:
 - a. Surat Nomor B-62/T.1.16/Cu.3/02/2013 tanggal 1 Maret 2013 perihal Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp787.700.000,00 yang ditujukan kepada Kepala KPPN Wamena yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yakni I PUTU SUARJANA, SH, MH;
 - b. Surat Pernyataan Nomor B-61/T.1.16/Cu.3/02/2013 tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp787.700.000,00 yang ditanda tangani oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH;
- Bahwa Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp787.700.000,00 yang ditanda tangani oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH akan digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Program / Kegiatan	Nilai (Rp)
I.	Seksi Pidana Khusus	
1.	Penyelidikan Kasus Korupsi	65.350.000,00
2.	Penyidikan Kasus Korupsi	165.350.000,00
3.	Pra Penuntutan Perkara TP Korupsi	29.240.000,00
4.	Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi	427.760.000,00
	Sub Jumlah 1	687.700.000,00
II.	Seksi Intelijen	
	Penguatan Jaringan Masyarakat Anti	



	KKN	
1.	Pengadaan Media Komunikasi	40.000.000,00
2.	Pengadaan Materi dan Brosur	40.000.000,00
3.	Konsumsi Sosialisasi Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN	14.000.000,00
4.	Biaya Saksi Ahli	6.000.000,00
	Sub Jumlah 2	100.000.000,00
	Jumlah	787.700.000,00

- Bahwa atas pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut, kemudian KPPN Wamena menandatangani Surat Nomor : S-212/WPB.33/KP.0502/2013 tanggal 4 Maret 2013 hal Persetujuan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp787.700.000,00 lalu FIRMAN RACHMAN membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Dana UP (UYHD) dan ditandatangani oleh ARIUS ABAMI, SH selaku PPSPM dan atas nama KPA Kejaksaan Negeri Wamena Nomor 00010 tanggal 4 Maret 2013 untuk penyediaan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp787.700.000,00 selanjutnya atas dasar SPM tersebut KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 927274Z/113/110 tanggal 5 Maret 2013, kemudian I PUTU SUARJANA, SH, MH ke BRI Cabang Wamena untuk melakukan pemindahbukuan ke Rekening Bank BRI Cabang Wamena nomor 031101000060308 atas nama Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Wamena;
- Bahwa setelah dana dipindahbukuan I PUTU SUARJANA, SH, MH dan Terdakwa FIRMAN RACHMAN menandatangani cek nomor 398952 senilai Rp855.381.600 di dalam jumlah tersebut termasuk penarikan tunai yang sumber dananya dari SP2D GU sebesar Rp56.059.500 dan SP2D LS sebesar Rp11.622.100 dan Terdakwa FIRMAN RACHMAN sendiri yang mengambil uang senilai Rp855.381.600 secara tunai namun sebagian diminta oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH untuk ditransfer uang tersebut ke rekening an. I PUTU SUARJANA, SH.MH, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selanjutnya dana sisanya Terdakwa FIRMAN RACHMAN bawa ke I PUTU SUARJANA, SH.MH dan selanjutnya sekitar tanggal 06 Maret 20013, I PUTU SUARJANA, SH.MH berangkat ke Jayapura kemudian sekitar tanggal 09 Maret Terdakwa FIRMAN RACHMAN juga ke Jayapura dan sesampai di Jayapura I PUTU SUARJANA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH menelepon Terdakwa FIRMAN RACHMAN untuk ketemu di hotel Horison Jayapura selanjutnya I PUTU SUARJANA, SH.MH memberikan Terdakwa FIRMAN RACHMAN uang sebesar Rp100.000.000,00., (seratus juta rupiah) dan I PUTU SUARJANA, SH, MH berkata "ini kamu pakai untuk panjar mobil";

- Bahwa dari dana yang telah dicairkan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan dana operasional dan tidak ada realisasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp787.700.000,00 namun sebelumnya Terdakwa FIRMAN RACHMAN sempat bertanya kepada I PUTU SUARJANA, SH.MH mengenai pertanggungjawabannya "buat saja dulu GU Nihil nya dan untuk pertanggungjawabannya nanti menyusul " tapi sampai sekarang belum juga dibuat namun sebagai pertanggungjawaban atas Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk keperluan belanja barang dengan jumlah sebesar Rp787.700.000,00 yang seolah-olah ada kegiatan, kemudian dibuatlah SPM Ganti UP Nihil, dan berdasarkan SPM Ganti UP Nihil tersebut, selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan SP2D pengesahan atas pertanggungjawaban uang persediaan untuk keperluan belanja barang dengan jumlah sebesar Rp787.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Pertanggungjawaban		Pengesahan dari KPPN		Nilai (Rp)
	SPM Ganti UP (Nihil)		SP2D Ganti UP (Nihil)		
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
Seksi Pidana Pidum dan Pidsus					
1.	00014	3 April 2013	927603Z/113/109	5 April 2013	230.700.000,00
2.	00015	3 April 2013	927604Z/113/109	5 April 2013	463.000.000,00
Sub jumlah 1					693.700.000,00
Seksi Intelijen					
3.	00016	3 April 2013	927605Z/113/109	April 2013	94.000.000,00
Sub jumlah 2					94.000.000,00
Jumlah					787.700.000,00

C. Pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp600.710.000,00 Tahun 2013

- Bahwa pada bulan April 2013 I PUTU SUARJANA, SH, MH memerintahkan Terdakwa FIRMAN RACHMAN untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp600.710.000,00, lalu I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku KPA Kejaksaan Negeri Wamena menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Surat Nomor B-206/T.1.16/Cu.3/05/2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp600.710.000,00 yang ditujukan kepada Kepala KPPN Wamena;

b. Surat Pernyataan Nomor B-207/T.1.16/Cu.3/05/2013 tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp600.710.000,00;

- Bahwa pengajuan Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp600.710.000,00 yang ditanda tangani oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH akan digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan Kejaksaan Negeri Wamena pada bulan Mei 2013 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No B	Uraian Program / Kegiatan	Nilai (Rp)
a	Seksi Pidana Khusus	
1. h	Penyelidikan Kasus Korupsi	32.675.000,00
2. w	Penyidikan Kasus Korupsi	82.675.000,00
a 3.	Seksi Pidana Khusus – Pra Penuntutan Perkara TPK	14.620.000,00
4. a	Penuntutan Perkara TPK	216.880.000,00
t	Sub Jumlah 1	346.850.000,00
a	Seksi Pidana Umum	
1 s	Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Pidum	93.330.000,00
p	Sub Jumlah 2	93.330.000,00
e	Seksi Intelijen	
1 n	Perkara Intelijen	160.530.000,00
g	Sub Jumlah 3	160.530.000,00
a	Jumlah 1 s.d. 3	600.710.000,00

juan dana tersebut Kepala KPPN Wamena menandatangani Surat Nomor S-450/WPB.33/KP. 0502/2013 hal Persetujuan Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan mendesak belanja barang sebesar Rp600.710.000,00 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Negeri Wamena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 1 Mei 2013, Terdakwa FIRMAN RACHMAN membuat SPM yang ditandatangani oleh Arius Abami, S.H. selaku Pejabat Penandatangan SPM dan atas nama KPA Kejaksaan Negeri Wamena Nomor 00022 untuk penyediaan tambahan uang persediaan sebesar Rp600.710.000,00 berdasarkan SPM tersebut, KPPN Wamena selaku Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 927962Z/113/110 tanggal 2 Mei 2013 untuk penyediaan tambahan uang persediaan sebesar Rp600.710.000,00 dana UP (UYHD) dan dana tersebut masuk ke rekening BRI Cabang Wamena atas nama Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Wamena pada tanggal 2 Mei 2013;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013, I PUTU SUARJANA, SH, MH dan Terdakwa FIRMAN RACHMAN menandatangani cek nomor CET 398957 senilai Rp612.332.100. di dalam jumlah tersebut termasuk penarikan tunai yang sumber dananya dari SP2D LS sebesar Rp11.622.100 dan setelah dananya diambil, I PUTU SUARJANA, SH, MH menyuruh agar Terdakwa FIRMAN RACHMAN mentransfer ke rekening I PUTU SUARJANA, SH.MH sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya oleh Terdakwa FIRMAN RACHMAN diserahkan kepada I PUTU SUARJANA kemudian sorenya setelah pulang kantor Terdakwa FIRMAN RACHMAN oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH di beri uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sambil mengatakan “ini kamu ambil untuk keluarga “;
- Bahwa atas pencairan dana tersebut I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama Terdakwa FIRMAN RACHMAN tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana operasional dan tidak ada realisasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp600.710.000,00 namun sebagai pertanggungjawaban atas Tambahan Uang Persediaan (TUP) dibuatlah seolah-olah ada kegiatan, dengan membuat SPM Ganti UP Nihil, selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan SP2D pengesahan atas pertanggungjawaban uang persediaan untuk keperluan belanja barang dengan jumlah sebesar Rp600.710.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pertanggungjawaban		Pengesahan dari KPPN		Nilai (Rp)
	SPM Ganti UP (Nihil)		SP2D Ganti UP (Nihil)		
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	

Hal. 17 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Pidana Khusus					
1.	00028	22 Mei 2013	928258Z/113/109	23 Mei 2013	115.350.000,00
2.	00029	22 Mei 2013	928259Z/113/109	23 Mei 2013	177.500.000,00
3.	00034	22 Mei 2013	928283Z/113/109	24 Mei 2013	104.250.000,00
Sub jumlah 1					397.100.000,00
Seksi Pidana Umum					
1.	00030	22 Mei 2013	928260Z/113/109	23 Mei 2013	93.330.000,00
Sub jumlah 2					93.330.000,00
Seksi Intelijen					
1.	00031	22 Mei 2013	928282Z/113/109	24 Mei 2013	27.280.000,00
2.	00032	22 Mei 2013	928262Z/113/109	23 Mei 2013	62.910.000,00
3.	00033	22 Mei 2013	928263Z/113/109	23 Mei 2013	20.090.000,00
Sub jumlah 3					110.280.000,00
Jumlah					600.710.000,00

D. Pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp310.700.000,00 Tahun 2013.

- Bahwa pada bulan Juli 2013 I PUTU SUARJANA, SH, MH memerintahkan Terdakwa FIRMAN RACHMAN untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp310.700.000,00, lalu I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Negeri Wamena menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Nomor B-265/T.1.16/Cu.3/07/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp310.700.000,00 yang ditujukan kepada Kepala KPPN Wamena;
- b. Surat Pernyataan Nomor B- /T.1.16/Cu.3/07/2013 tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp310.700.000,00 ;

- Bahwa pengajuan pencairan dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp310.700.000,00 akan digunakan oleh Kejaksaan Negeri Wamena untuk melaksanakan program/kegiatan pada bulan Juli 2013 dengan rangkuman kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian Program / Kegiatan	Nilai (Rp)
Seksi Pidana Khusus		
1.	Pra Penuntutan dan Penuntutan TP Khusus Lainnya	21.260.000,00
2.	Persidangan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya	29.370.000,00

Hal. 18 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Jumlah 1	50.630.000,00
	Seksi Pidana Umum	
1	Pra Penuntutan dan Penuntutan Tindak Pidana Pidum	161.455.000,00
	Sub Jumlah 2	161.455.000,00
	Seksi Intelijen	
1.	Penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejari/Cabang Kejari	67.200.000,00
	Sub Jumlah 3	67.200.000,00
	Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
1.	Penegakan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	11.115.000,00
2.	Operasional Pos Media Informasi & Yankum Gratis	31.415.000,00
	Sub Jumlah 4	42.530.000,00
	Jumlah 1 s.d. 4	310.700.000,00

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013, KPPN Wamena menandatangani Surat Nomor : S-758/WPB.33/KP. 0502/2013 perihal Persetujuan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp310.700.000,00 untuk keperluan mendesak belanja barang yang ditujukan kepada I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Negeri Wamena, lalu berdasarkan surat tersebut Terdakwa FIRMAN RACHMAN membuat SPM yang kemudian ditandatangani oleh Arius Abami, S.H. selaku Pejabat Penandatangan SPM Nomor 00048 sebesar Rp310.700.000,00 dan berdasarkan SPM tersebut, KPPN Wamena selaku Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 929395Z/113/110 tanggal 24 Juli 2013 dan dana tersebut masuk ke rekening BRI Cabang Wamena atas nama Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Wamena pada tanggal 24 Juli 2013;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2013, I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama dengan Terdakwa FIRMAN RACHMAN menandatangani cek nomor CET 398966 senilai Rp310.700.000,00 lalu Terdakwa FIRMAN RACHMAN mengambil sendiri uang di Bank dan diserahkan kepada I PUTU SUARJANA, SH, MH selanjutnya Terdakwa FIRMAN RACHMAN di beri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Hal. 19 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil I PUTU SUARJANA, SH., MH berkata "ini untuk kau pegang "

- Bahwa atas pencairan dana tersebut I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama dengan Terdakwa FIRMAN RACHMAN tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana operasional dan tidak ada realisasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp310.700.000,00 namun dibuatlah seolah-olah ada kegiatan, kemudian Terdakwa FIRMAN RACHMAN membuat SPM Ganti UP Nihil, dan selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan SP2D pengesahan atas pertanggungjawaban uang persediaan untuk keperluan belanja barang dengan jumlah sebesar Rp310.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pertanggungjawaban		Pengesahan dari KPPN		Nilai (Rp)
	SPM Ganti UP (Nihil)		SP2D Ganti UP (Nihil)		
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
Seksi Pidana Khusus					
1.	00053	20 -8-2013	929749Z/113/109	21 Agts 2013	37.910.000,00
Sub jumlah 1					37.910.000,00
Seksi Pidana Umum					
1.	00052	20 -8-2013	929748Z/113/109	21 Agts 2013	174.175.000,00
Sub jumlah 2					174.175.000,00
Seksi Intelijen					
1.	00050	20 -8- 2013	929746Z/113/109	21 Agts 2013	23.640.000,00
2.	00051	20 -8- 2013	929747Z/113/109	21 Agts 2013	43.560.000,00
Sub jumlah 3					67.200.000,00
Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara					
1.	00054	20 -8- 2013	929750Z/113/109	21 Agts 2013	11.115.000,00
2.	00055	20 -8- 2013	929751Z/113/109	21 Agts 2013	20.300.000,00
Sub jumlah 4					31.415.000,00
Jumlah					310.700.000,00

- E. Bahwa antara tanggal 1 Maret 2013 s/d tanggal 30 September 2013 Terdakwa FIRMAN RACHMAN telah membuat 11 (sebelas) SPM Ganti Uang (GU) sebesar Rp623.315.500,
- Bahwa Terdakwa FIRMAN RACHMAN membuat 11 (sebelas) Surat Perintah Membayar Ganti Uang (GU) Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp623.315.500 yang ditandatangani oleh ARIUS ABAMI, SH lalu di kirimkan ke KPPN Wamena dan berdasarkan SPM GU tersebut, selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan 11 (sebelas) SP2D GU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang dengan rincian sbb :

No	SPM Ganti Uang (GU)		SP2D Ganti Uang (GU)		Jumlah (Rp)
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1.	00011	4 Maret 2013	927273Z/113/110	5 Maret 2013	56.059.500
2.	00013	22 Maret 2013	927504Z/113/110	25 Maret 2013	62.814.500
3.	00018	4 April 2013	927602Z/113/110	5 April 2013	100.000.000,00
4.	00021	21 Mei 2013	928257Z/113/110	23 Mei 2013	58.614.500
5.	00038	13 Juni 2013	928687Z/113/110	13 Juni 2013	58.614.500
6.	00040	4 Juli 2013	929016Z/113/110	5 Juli 2013	64.825.000,00
7.	00047	19 Juli 2013	929269Z/113/110	19 Juli 2013	85.017.500
8.	00056	20 Agust 2013	929752Z/113/110	21 Agust 2013	80.300.000,00
9.	00058	12 Sept 2013	930130Z/113/110	13 Sept 2013	11.000.000,00
10.	00059	12 Sept 2013	930131Z/113/110	13 Sept 2013	12.570.000,00
11.	00060	12 Sept 2013	930132Z/113/110	13 Sept 2013	33.500.000,00
Jumlah					623.315.500

- Bahwa Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp623.315.500 berdasarkan rincian program/kegiatan adalah untuk :

No	Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)
I.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	
1.	Belanja Keperluan Perkantoran	144.839.750,00
2.	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	6.500.000,00
3.	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	72.330.000,00
4.	Belanja Barang Operasional Lainnya	19.800.000,00
5.	Belanja Langganan Listrik	19.397.500
6.	Belanja Langganan Telepon	19.400.000,00
7.	Belanja Jasa Pos dan Giro	34.800.000,00
8.	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105.555.250,00
9.	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	110.323.000,00
	Sub Jumlah 1	532.945.500
II.	Penyelenggaraan Non Operasional Perkantoran	
1.	Belanja Bahan	38.300.000,00
2.	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	52.070.000,00
	Sub Jumlah 2	90.370.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	623.315.500
--------	-------------

- Bahwa selanjutnya antara 1 Maret 2013 sampai dengan 30 September 2013 I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama dengan Terdakwa FIRMAN RACHMAN melakukan penarikan tunai dengan menandatangani cek dengan rincian sebagai berikut:

No.	Cek		Tanggal Penarikan Tunai	Jumlah (Rp)
	Nomor	Tanggal		
1.	CET 398952	5 -3-2013	5 -3- 2013	56.059.500 (nilai cek Rp855.381.600 karena gabung dengan TUP Maret 2013)
2.	CET 398953	28 -3- 2013	28 -3- 2013	62.814.500 (nilai cek Rp104.717.300 karena gabung dengn LS)
3.	CET 398954	5 -4- 2013	5 -4- 2013	100.000.000,00
4.	CET 398958	23 -5- 2013	23 -5- 2013	58.614.500
5.	CET 398961	14 -6- 2013	14 -6- 2013	58.614.500
6.	CET 398962	5 -7- 2013	5 -7- 2013	64.825.000,00 (nilai cek 70.636.000,00 gabung dengan LS)
7.	CET 398965	19 -7- 2013	19 -7- 2013	85.017.500
8.	CET 398967	21 -8- 2013	21 -8- 2013	80.300.000,00
9.	CET 398969	13 -9- 2013	13 -9- 2013	57.070.000,00
Jumlah				623.315.500

Bahwa I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama Terdakwa FIRMAN RACHMAN tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana operasional sebagaimana tersebut dan tidak ada realisasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp623.315.500 ;

F. Bahwa antara tanggal 1 Maret 2013 s/d 31 Juli 2013 Terdakwa FIRMAN RACHMAN telah membuat 8 (delapan) SPM Langsung (LS) sebesar Rp87.384.700 untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa.

- Bermula Terdakwa FIRMAN RACHMAN membuat 8 (delapan) SPM Langsung (LS) dan ditandatangani oleh ARIUS ABAMI, SH untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp87.384.700. Lalu di kirim ke KPPN Wamena, selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan 8 (delapan) SP2D Langsung (LS) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp87.384.700 untuk Keperluan Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa.

- Bahwa Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp87.384.700 berdasarkan SPM LS dan SP2D LS adalah sebagai berikut:

Surat Perintah Dinas		SPM LS		SP2D LS		Jumlah (Rp)
No	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1	19-02-2013	00009	19-2-2013	927203Z	20-2-2013	24.224.200
2	21-2-2013	00008	04-3-2013	927293Z	05-3-2013	11.622.100
3	30-4-2013	00020	25-4-2013	927889Z	26-4-2013	11.622.100
4	05-5-2013	00023	02-5-2013	927961Z	02-5-2013	11.622.100
5	10-6-2013	00036	04-6-2013	928516Z	05-6-2013	11.622.100
6	25-6-2013	00041	04-7-2013	929017Z	05-7-2013	5.811.050,00
7	05-7-2013	00045	16-7-2013	929203Z	16-7-2013	5.050.000,00
8	16-7-2013	00046	16-7-2013	929212Z	16-7-2013	5.811.050,00
Jumlah						87.384.700

- Bahwa selanjutnya dalam periode 1 Februari 2013 sampai dengan 31 Juli 2013, I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama dengan Terdakwa FIRMAN RACHMAN melakukan penarikan tunai dengan menandatangani cek dengan rincian sebagai berikut:

No	Cek		Tanggal Penarikan Tunai	Jumlah (Rp)
	Nomor	Tanggal		
1.	CET 397950	20 Februari 2013	20 Februari 2013	24.224.200
2.	CET 398952	5 Maret 2013	5 Maret 2013	11.622.100 (nilai cek 855.381.600 gabung dengan TUP dan GU)
3.	CET 398956	29 April 2013	29 April 2013	11.622.100
4.	CET 398957	2 Mei 2013	2 Mei 2013	11.622.100 (nilai cek 612.332.100 gabung dengan TUP)
5.	CET 398960	5 Juni 2013	5 Juni 2013	11.622.100
6.	CET 398962	5 Juli 2013	5 Juli 2013	5.811.050,00 (nilai cek 70.636.050,00 gabung dengan GU)
7.	CET 398965	16 Juli 2013	16 Juli 2013	10.861.050,00 (nilai cek 85.017.500 gabung dengan GU)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	87.384.700
--------	------------

- Bahwa penggunaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama Terdakwa FIRMAN RACHMAN selaku Bendahara Pengeluaran Kejari Wamena pada periode Januari sampai dengan September 2013 dari pencairan dana sebesar Rp2.509.810.200 adalah sebesar Rp242.512.266,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
I.	Biaya Operasional Jaksa / staf Jaksa	
1.	Fransiska L.Wonmaly, S.H./Kepala Seksi Pidsus	25.000.000,00
2.	Teguh Basuki Heru Y., M.H. /Kepala Seksi Pidum	10.000.000,00
3.	Filemon Ketaren, S.H. /Kepala Seksi Perdatun	10.000.000,00
4.	Nixon N. Mahuse, S.H., M.H. /Kepala Seksi Intel	10.000.000,00
5.	Vallerianus CD Sawaki, S.H./Jaksa Fungsional	10.000.000,00
6.	Ricarda Arsenius, S.H. /Jaksa Fungsional	10.000.000,00
7.	Naman Medlama	5.000.000,00
8.	Aryus Bisay/Kaur Perlengkapan	5.000.000,00
	Sub Jumlah I	85.000.000,00
No.	Uraian	Jumlah (Rp)
II.	Biaya /Honorarium Pengelola Satker	
1.	I Putu Suarjana, S.H., M.H./KPA	9.990.000,00
2.	Arius Abami	2.700.000,00
3.	Shally A. Peetom, S.H./Bendahara Penerimaan	1.680.000,00
4.	Firman Rachman/Bendahara Pengeluaran	6.930.000,00
5.	Philippus Sapranim	3.000.000,00
6.	Jayrus Sief	1.000.000,00
7.	Beni Sief	1.000.000,00
	Sub Jumlah II	26.300.000,00
III.	Biaya Operasional Kantor	

Hal. 24 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Perjalanan Dinas	87.384.700
2.	Biaya Telepon	4.726.706,00
3.	Biaya Listrik (PT PLN) – 3 no. Rek	1.637.100
4.	Biaya pengiriman Pos dan Giro	104.960,00
5.	Biaya Pengadaan ATK- fotocopy	3.358.800
6.	Biaya BBM Kendaraan Dinas Roda 4 (2 unit)	9.000.000,00
7.	Penggantian biaya service kendaraan	25.000.000,00
	Sub Jumlah III	131.212.266,00
	Jumlah I s.d. III	242.512.266,00

Sehingga penggunaan anggaran Kejaksaan Negeri Wamena untuk periode Januari s/d September 2013 yaitu :

1. Pencairan dana periode Januari s/d September 2013 :

- a. SPM TUP/SP2D PTUP (dari TUP) Rp1.699.110.000,00;
- b. SPM GU/SP2D GU (dari GU) Rp 623.315.500;
- c. SPM UP/SP2D GUP (dari UP) Rp 100.000.000,00;
- d. SPM LS/SP2D LS Rp 87.384.810,00;
- Jumlah 1 Rp2.509.810.200;

2. Pengeluaran yang dapat di pertanggung jawabkan :

- a. Biaya operasional Jaksa Rp 85.000.000,00;
- b. Biaya honorarium pengelolaan Satker Rp 26.300.000,00;
- c. Biaya telepon kantor Rp 4.726.706,00;
- d. Biaya pengadaan ATK/photo copy Rp 3.358.800;
- e. Biaya Listrik Rp 1.637.100;
- f. Biaya pengiriman pos dan giro Rp 104.960,00;
- g. Biaya BBM kendaraan dinas Rp 9.000.000,00;
- h. Biaya perjalanan dinas Rp 87.384.700;
- i. Penggantian biaya servis kendaraan Rp 25.000.000,00;
- Jumlah Rp242.297.934,00;

3. Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan : 1 – sebesar Rp2.267.297.934.000,00;

23. Bahwa dalam hal pengelolaan anggaran pada Kejaksaan Negeri Wamena I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Pengguna Anggaran bersama dengan Terdakwa FIRMAN RACHMAN selaku Bendahara Pengeluaran Kejari Wamena dalam Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 telah melakukan pencairan dan penggunaan anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Kejari Wamena tidak berpedoman atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain :

Pasal 1 Ayat (18)

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.

Pasal 21 Ayat (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

Pasal 21 Ayat (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada Ayat (3) tidak dipenuhi;

Pasal 1 Ayat (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga /Kantor/Satuan Kerja antara lain :

Pasal 1 Ayat (27) Laporan pertanggungjawaban Bendahara, yang selanjutnya disingkat LPJ, adalah laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang;

Pasal 2 Ayat (1) Kewajiban melakukan penatausahaan dan penyusunan LPJ dilakukan oleh setiap Bendahara Penerimaan/Pengeluaran pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga, termasuk BPP dan bendahara pengelola dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;

Hal. 26 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (2) Penatausahaan dan penyusunan LPJ Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dilakukan atas pengelolaan uang atau surat berharga dalam rangka pelaksanaan APBN;

Pasal 3 Ayat (3) Tugas kebhendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;

Pasal 3 Ayat (11) Bendahara wajib menatausahakan seluruh uang yang dikelolanya dan seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja;

Pasal 3 Ayat (12) Bendahara bertanggung jawab sebatas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN;

Pasal 9 Ayat (2) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran UP yang dikelolanya setelah:

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh PA/ Kuasa PA meliputi kuitansi/tanda terima, faktur pajak, dan dokumen lainnya yang menjadi dasar hak tagih;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga; dan
- c. Menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu/ sisa pagu DIPA untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya;

Pasal 14 Ayat (1) Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran meliputi seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja yang berada dibawah pengelolaannya;

Pasal 14 Ayat (2) dalam rangka menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan dalam Buku Kas, buku-buku pmbantu dan Buku Kas Umum;

3. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tat Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain :

Pasal 1 Ayat (17) Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada

Hal. 27 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung;

Pasal 1 Ayat (19) Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan;

Pasal 24 Ayat (1) :

Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebhendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi:

- a. Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan
- b. Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN;

Pasal 24 Ayat (2) Pelaksanaan tugas kebhendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi:

- a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
- b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
- e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
- g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.

Pasal 27 Ayat 1

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1);

Pasal 43 Ayat (3) Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia

Hal. 28 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang /jasa paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas;

Pasal 43 Ayat (4) Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp50.000.000,00;

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja antara lain :

Pasal 4 Ayat (1) Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya;

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/Pb/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain :

Pasal 7 Ayat:

(3) Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran;

(8) Syarat untuk mengajukan Tambahan UP antara lain:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
- b. Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;

(9) Dalam mengajukan TUP, bendahara wajib menyampaikan dalam butir a.Rincian Rencana Penggunaan Dana untuk kebutuhan mendesak dan riil serta rincian dana MAK yang dimintakan TUP;

24. Bahwa terhadap pengelolaan anggaran pada Kejaksaan Negeri Wamena I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Pengguna Anggaran bersama dengan Terdakwa FIRMAN RACHMAN selaku Bendahara Pengeluaran Kejari Wamena dalam Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3.175.667.419,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sbb :

Hal. 29 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2012 (bulan Desember 2012)				
(1)	Realisasi Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana berdasarkan jenis SPM/SP2D:				
	a. SPM TUP/SP2D TUP	Rp	1.040.650.000,00		
	b. Setoran Pengembalian TUP	Rp	37.880.000,00		
	c. SPM/SP2D GU Nihil (a-b)	Rp	1.002.770.000,00		
	d. SPM GU/SP2D GU Nihil (dari GU)	Rp	40.000.000,00		
	Sub Jumlah (1) c+d			Rp	1.042.770.000,00
(2)	Pengeluaran yang Dapat Dipertanggungjawabkan:				
	a. Honorarium Pengelola Anggaran	Rp	8.800.000,00		
	b. Biaya Operasional Seksi-Seksi	Rp	96.000.000,00		
	c. Operasional Perkantoran	Rp	2.206.510,00		
	d. Penyetoran Pajak	Rp	22.394.005,00		
	d. Operasional Lainnya	Rp	5.000.000,00		
	Sub Jumlah (2)			Rp	134.400.515,00
	Kerugian Keuangan Negara (1) – (2)			Rp	908.369.485,00
2)	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2013 (Periode Januari s.d. September 2013)				
(1)	Realisasi Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana berdasarkan jenis SPM/SP2D:				
	a. SPM TUP/SP2D PTUP (dari TUP)	Rp	1.699.110.000,00		
	b. SPM GU/SP2D GU (dari GU)	Rp	623.315.500		
	c. SPM UP/SP2D GUP Nihil (dari UP)	Rp	100.000.000,00		
	d. SPM LS/SP2D LS	Rp	87.384.700		
	Sub Jumlah (1)			Rp	2.509.810.200
(2)	Pengeluaran yang Dapat Dipertanggungjawabkan:				
	a. Honorarium Pengelola Anggaran	Rp	26.300.000,00		
	b. Biaya Operasional Seksi-Seksi	Rp	85.000.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c.Biaya Operasional Perkantoran	Rp	43.827.566,00		
	d. Belanja Perjalanan Dinas	Rp	87.384.700		
	Sub Jumlah (2)			Rp	242.512.266,00
	Kerugian Keuangan Negara (1) – (2)			Rp	2.267.297.934,00
	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2012/2013:(1)+2)			Rp	3.175.667.419,00

Sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-879/PW26/5/2014 tanggal 29 April 2014 sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;
SUBSIDIAIR:

Terdakwa FIRMAN RACHMAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Kejaksaan Negeri Wamena berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena Nomor : KEP-36/T.1.16/Cu.3/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 dan berdasarkan Surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena Nomor : KEP-/T.1.16/Cu.3/01/2013 tanggal 3 Januari 2013, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan I PUTU SUARJANA, SH, MH Kepala Kejaksaan Negeri Wamena berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-347/JA/05201 tanggal 22 Mei 2012 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Desember 2012 dan pada bulan Januari sampai dengan bulan September 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012 dan tahun 2013 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Wamena Jalan A. Yani No. 25, Wamena atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dipandang sebagai perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa FIRMAN RACHMAN yang berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor ; KEP-I-729/C.4.3/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena Nomor : KEP-36/T.1.16/Cu.3/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran pada Kejaksaan Negeri Wamena;
2. Bahwa sebagai bendahara Pengeluaran Terdakwa FIRMAN RACHMAN mempunyai tugas antara lain :
 - ❖ Melakukan penatausahaan dan penyusunan LPJ dilakukan oleh setiap bendahara Pengeluaran pada satuan kerja, menyerahkan uang atau surat berharga atau barang milik Negara;
 - ❖ Keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan;
 - ❖ Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA;
 - ❖ Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - ❖ Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - ❖ Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran;
 - ❖ Berani menolak perintah bayar dari PA/KPA apabila tidak benar apabila UP tidak benar;
 - ❖ Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - ❖ Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan dalam Buku Kas, buku-buku pembantu dan Buku Kas Umum, terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang berada dibawah pengelolannya;
3. Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 terdapat anggaran yang dikelola oleh Kejaksaan Negeri Wamena sebesar Rp3.591.199.000,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2012 Nomor : 0453/006-01.2.01/30/2012 dan untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp3.942.049.000,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat puluh sembilan ribu rupiah) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA

Hal. 32 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Nomor : DIPA-006.01.2.008991/2013 yang kedua anggaran tersebut bersumber dari APBN;

4. Bahwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wamena berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-347/JA/05201 tanggal 22 Mei 2012 telah mengeluarkan Surat keputusan Nomor KEP-27/T.1.16/Cu.3/07/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dan Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dengan susunan :

No	Nama	Jabatan
1.	I PUTU SUARJANA, SH, MH/ Kepala Kejaksaan Negeri Wamena	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	I PUTU SUARJANA, SH, MH/ Kepala Kejaksaan Negeri Wamena	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	ARIUS ABAMI, SH/Kasubagbin Kejari Wamena	Pejabat Penanda Tangan SPM
4.	SHELLY A. PEETOM, SH/Staf Pembinaan	Bendahara Pengeluaran
5.	FIRMAN RACHMAN/Staf Pidum	Bendahara Penerimaan
6.	HEIN JIMI ANSANAY/ Staf Pidum	Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

5. Bahwa berawal pada bulan Nopember 2012 I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wamena dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan SHALLY A PEETOOM selaku bendahara Pengeluaran Kejari Wamena untuk membuat Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp1.040.650.000,00 (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tahun 2012 I PUTU SUARJANA, SH, MH telah membuat surat yaitu :
 - 1) Surat Nomor B-1051/T.1.16/Cu.3/11/2012 tanggal 19 November 2012 perihal Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp1.040.650.000,00 (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditandatangani oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH dan surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah XXX Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara di Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Pernyataan tanggal 19 November 2012 atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Wamena yang ditanda tangani oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH yang isinya
 - a. Bahwa dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan digunakan untuk keperluan yang sifatnya mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D
 - b. Bahwa apabila terdapat dana sisa dana TUP akan disetorkan ke rekening Kas Negara.
 - c. Bahwa dana TUP tidak untuk membiayaan pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.
- 3) Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp1.040.650.000,00 (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan yang intinya sebagai berikut:

No.	Uraian Program/Kegiatan	Nilai (Rp)
1.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	
	Honor Operasional Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Satker	15.400.000,00
	Sub Jumlah 1	15.400.000,00
2.	Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen	
	Penyelidikan Tertutup (Surveillance)	20.090.000,00
	Penyuluhan Hukum pada Kejari Wamena	3.490.000,00
	Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN	81.500.000,00
	Sub Jumlah 2	105.080.000,00
3.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	
	Pra Penuntutan Perkara Pidana Umum pada Kejari Wamena	58.250.000,00
	Penuntutan Perkara Pidana Umum pada Kejari Wamena	398.300.000,00
	Sub Jumlah 3	456.550.000,00
4.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	
	Penyidikan Perkara Korupsi	157.080.000,00

Hal. 34 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pra Penuntutan Perkara Korupsi	16.400.000,00
	Penuntutan Perkara Korupsi	28.140.000,00
	Pra Penuntutan Perkara Khusus	22.800.000,00
	Penuntutan Perkara Khusus	99.960.000,00
	Persidangan Perkara Tipikor	139.240.000,00
	Sub Jumlah 4	463.620.000,00
	Jumlah	1.040.650.000,00

7. Bahwa setelah surat pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tahun 2012 yang diajukan I PUTU SUARJANA, SH, MH tersebut kemudian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua mengeluarkan Surat Nomor: S-2593/WPB.33/BD.0301/2012 tanggal 22 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Negeri Wamena hal Permintaan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp1.040.650.000,00 (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa selanjutnya ARIUS ABAMI, SH selaku Kasubagbin Kejaksaan Negeri Wamena dan selaku Pejabat Penandatanganan SPM menandatangani SPM Dana UP (UYHD)/Tambahan Uang Persediaan Nomor 00092/KEJAKSAAN-UP/2012 tanggal 22 Nopember 2012 untuk penyediaan tambahan uang persediaan untuk satuan kerja Kejaksaan Negeri Wamena sebesar Rp1.040.650.000,00 (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa berdasarkan SPM Nomor 00092/KEJAKSAAN-UP/2012 tanggal 22 November 2012, selanjutnya KPPN Wamena selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) melakukan pemindahbukuan ke rekening bank BRI Cabang Wamena nomor 0311 01 000060 308 atas nama Kejaksaan Negeri Wamena dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 925309Z/113/111 tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp1.040.650.000,00 (satu milyar empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana tersebut masuk ke rekening bank BRI Cabang Wamena nomor 0311 01 000060 308 atas nama Kejaksaan Negeri Wamena;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2012, SHALLY A PEETOOM dan I PUTU SUARJANA, SH, MH menandatangani cek nomor CET 397944 senilai Rp1.042.836.100 (termasuk dana untuk belanja pegawai sebesar Rp2.186.100), dan uangnya pada tanggal 7 Desember 2012 telah diambil oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama dengan Terdakwa FIRMAN

Hal. 35 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAN, sehingga SHALLY A PEETOOM mengajukan pengunduran diri selaku bendahara Pengeluaran maka I PUTU SUARJANA, SH, MH mengangkat Terdakwa FIRMAN RACHMAN selaku bendahara Pengeluaran dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena Nomor : KEP-36/T.1.16/Cu.3/12/2012 tanggal 10 Desember 2012;

11. Bahwa pada saat uang sebesar Rp1.042.836.100 dicairkan lalu sebagian telah ditransfer ke rekening BRI nomor 030701044490508 atas nama Terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH;
12. Bahwa I PUTU SUARJANA, SH, MH setelah mencairkan uang sebesar Rp1.042.836.100 langsung memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00.(lima juta rupiah) kepada Terdakwa FIRMAN RACHMAN sambil mengatakan "kamu ambil uang ini untuk pakai belajar membuat Ganti Uang Nihil (GU Nihil) di Kejaksaan Tinggi Papua dan setelah itu kamu kembali untuk membuat GU Nihil untuk mempertanggung jawabkan uang Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah) yang sudah kita ambil menggunakan TUP tersebut " sehingga pada tanggal 08 Desember 2012 Terdakwa FIRMAN RACHMAN berangkat ke Jayapura untuk belajar membuat GU Nihil di Kejaksaan Tinggi Papua dengan dibimbing oleh HAMZA FARUUK Kabag Keuangan Kejaksaan Tinggi Papua;
13. Bahwa Dari pencairan dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp1.040.650.000,00 oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama dengan Terdakwa FIRMAN RACHMAN sebesar Rp127.194.005,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh empat ribu lima rupiah) telah digunakan dengan rincian :
 1. Biaya operasional pelaksanaan penanganan perkara pidana umum sebelum bulan Desember 2012 diserahkan kepada para jaksa sebesar Rp96.000.000,00 dengan Rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	JUMAH (Rp)
1	2	3	4
1.	FRANSINKA L WONMALY, SH	Kasi Pidsus	Rp18.900.000,00
2.	FRANSINKA L WONMALY, SH	Kasi Pidsus	Rp15.000.000,00
3.	VALLERIANUS CD SAWAKI, SH	Jaksa Fungsional	Rp16.200.000,00
4.	TEGUH BASUKI HERU YUWONO	Kasi Pidum	Rp9.900.000,00
5.	FILEMON KETAREN, SH	Kasi Datun	Rp30.600.000,00
6.	YUDHA SIAHAAN, SH	Kasi Intelijen	Rp5.400.000,00
		Jumlah	Rp96.000.000,00

Hal. 36 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



2. Pembayaran Honor Operasional Pengelolaan Keuangan Satker Kejaksaan Negeri Wamena dan penyeteroran pajak (PPN, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 22) periode September sampai dengan Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA/JABATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	I PUTU SUARJANA, SH, MH / KPA	Rp3.400.000,00
2.	SHALLY A PEETOOM, SG/Bendahara Pengeluaran	Rp2.400.000,00
3.	FIRMAN RACHMAN / Bendahara Penerima	Rp1.200.000,00
4.	HEIN ANSANAY/Pembuat Daftar Gaji	Rp1.800.000,00
5.	Penyeteroran Pajak-pajak	Rp22.394.005,00
Jumlah		Rp.31.194.005,00

14. Bahwa Terdakwa FIRMAN RACHMAN untuk mempertanggung jawabkan uang sebesar Rp1.040.650.000,00 dengan cara membuat Ganti uang (GU) nihil sebagai Pertanggung jawaban yaitu menggunakan SPM Nihil yang dibuat seolah-olah uang yang telah diambil dengan mekanisme TUP sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah) telah digunakan sesuai dengan Rincian Penggunaan Dana yang di buat pada saat pengajuan TUP, dimana pembuatan SPM nihil tersebut sudah disampaikan Terdakwa FIRMAN RACHMAN kepada I PUTU SUARJANA, SH, MH bahwa "ini uang tidak bisa digunakan karena tidak ada pertanggung jawabannya" namun dijawab oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH "buat saja pertanggung jawab ke KPPN dengan SPM Nihil nanti buktinya kita pertanggung jawabkan pelan-pelan" dan bukti-bukti tersebut tidak pernah ada;
15. Bahwa selain Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp1.040.650.000,00 (satu milyar empat puluh enam ratus lima puluh ribu rupiah) I PUTU SUARJANA, SH, MH telah menyuruh bendahara lama SHELLY PETOOM untuk mengajukan Ganti UP untuk Penggantian Uang Persediaan keperluan Belanja Barang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu SHELLY PETOOM membuat SPM Ganti UP untuk Penggantian Uang Persediaan keperluan Belanja Barang sebesar Rp40.000.000,00 dan ditandatangani oleh ARIUS ABAMI, SH Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00096/GU/KEJAKSAAN WMN/2012 tanggal 5 Desember 2012 selanjutnya KPPN Wamena melakukan pemindahbukuan ke Rekening Bank BRI Cabang Wamena nomor 0311 01 000060 308 atas nama Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Wamena dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 925539Z/113/111 tanggal 6 Desember 2012 sebesar Rp40.000.000,00 untuk penggantian uang persediaan satuan kerja Kejaksaan Negeri Wamena;

16. Bahwa rencana penggunaan dana sebesar Rp40.000.000,00 adalah untuk kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Program/Kegiatan	Nilai (Rp)
1.	Belanja Keperluan Perkantoran	12.129.000,00
2.	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.000.000,00
3.	Belanja Langganan Listrik	500.000,00
4.	Belanja Langganan Telepon	4.261.000,00
5.	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.510.000,00
6.	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
	Jumlah	40.000.000,00

17. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012, I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama dengan Terdakwa FIRMAN RACHMAN melakukan penarikan tunai dana untuk Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dari rekening milik Kejaksaan Negeri Wamena di BRI Cabang Wamena dengan menggunakan cek nomor CET 397944 sebesar Rp69.308.550,00 termasuk penarikan tunai untuk Belanja Pegawai Kejaksaan Negeri Wamena bulan Desember sebesar Rp29.308.550,00 namun uang Rp40.000.000,00 juta setelah cair dipegang semua oleh Terdakwa;

18. Bahwa khusus untuk dana GU sebesar Rp40.000.000,00 pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

No.	Uraian Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Pengiriman Pos Giro	47.970,00
2.	Biaya Pengadaan ATK – Fotocopy	144.600
3.	Biaya Telepon	1.013.940,00
4.	Biaya Operasional (BBM) Kendaraan Dinas Roda 4	1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Operasional bendahara)	Lainnya (perjalanan dinas)	5.000.000,00
Jumlah			7.206.510,00

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa FIRMAN RACHMAN membuat SPM untuk pertanggungjawaban TUP Desember 2012 sebesar Rp1.040.650.000,00 dan Ganti Uang (GU) sebesar Rp40.000.000,00 yang ditandatangani ARIUS ABAMI, SH tanggal 31 Desember 2013 berikut dengan SP2D yang di buat oleh KPPN Wamena dengan rincian sebagai berikut :

No	Pertanggungjawaban KPA		Pengesahan dari KPPN		Nilai (Rp)
	SPM TUP/GUP (Nihil)		SP2D TUP/GUP (Nihil)		
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
I.	Pertanggungjawaban dan Pengesahan TUP Nihil Rp1.002.770.000,00				
1.	00095	31 Des 2012	926277Z/113/109	31 Des 2012	148.000.000,00
2.	00098	31 Des 2012	926261Z/113/109	31 Des 2012	15.400.000,00
3.	00099	31 Des 2012	926262Z/113/109	31 Des 2012	58.250.000,00
4.	00100	31 Des 2012	926268Z/113/109	31 Des 2012	99.960.000,00
5.	00101	31 Des 2012	926269Z/113/109	31 Des 2012	28.140.000,00
6.	00102	31 Des 2012	926263Z/113/109	31 Des 2012	22.800.000,00
7.	00103	31 Des 2012	926271Z/113/109	31 Des 2012	16.400.000,00
8.	00104	31 Des 2012	926264Z/113/109	31 Des 2012	152.300.000,00
9.	00105	31 Des 2012	926265Z/113/109	31 Des 2012	246.000.000,00
10.	00106	31 Des 2012	926266Z/113/109	31 Des 2012	84.990.000,00
11.	00107	31 Des 2012	926270Z/113/109	31 Des 2012	20.090.000,00
12.	00108	31 Des 2012	926267Z/113/109	31 Des 2012	110.440.000,00
	Sub Jumlah I				1.002.770.000,00
II.	Pertanggungjawaban dan Pengesahan GU (Nihil) Rp40.000.000,00				
1.	00109	31 Des 2012	926272Z/113/109	31 Des 2012	40.000.000,00
	Jumlah Pertanggungjawaban dan Pengesahan TUP/GU (Nihil)				1.042.770.000,00

20. Bahwa I PUTU SUARJANA, SH, MH memerintahkan Terdakwa FIRMAN RACHMAN untuk membuat 12 (dua belas) SPM TUP/GUP (Nihil) tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp1.002.770.000,00 dan 1 (satu) SPM GU (Nihil) tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp40.000.000,00 padahal tidak ada kegiatannya dengan berkata "Man tolong bantu untuk membuat pertanggungjawaban berupa GUP Nihil dan UP Nihil berkoordinasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak HAMZAH karena sampai batas waktu yang ditentukan bisa jadi uang dikembalikan “ Bahwa dana TUP Desember 2012 sebesar Rp1.040.650.000,00 dan dana Ganti Uang (GU) sebesar Rp40.000.000,00 tidak pernah dilaksanakan atau tidak ada kegiatannya dan uangnya dipegang semua oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH;

21. Bahwa terhadap penerbitan SPM Pertanggungjawaban GUP (Nihil) bulan Desember 2012 sebesar Rp1.042.770.000,00 I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Terdakwa FIRMAN RACHMAN selaku Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Wamena telah menandatangani 21 (dua puluh satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), yang mna SPTB tersebut dibuat seolah-olah kegiatannya ada dan sudah selesai, namun faktanya tidak ada sama sekali, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SPTB	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	SPTB-02/T.1.16/Cu.3/12/2012	15.400.000,00	SPM Nomor 00098
2.	SPTB-03/T.1.16/Cu.3/12/2012	20.090.000,00	SPM Nomor 00107
3.	SPTB-04/T.1.16/Cu.3/12/2012	3.490.000,00	SPM Nomor 00106
4.	SPTB-05/T.1.16/Cu.3/12/2012	81.500.000,00	SPM Nomor 00106
5.	SPTB-06/T.1.16/Cu.3/12/2012	152.300.000,00	SPM Nomor 00104
6.	SPTB-07/T.1.16/Cu.3/12/2012	2.400.000,00	SPM Nomor 00103
7.	SPTB-08/T.1.16/Cu.3/12/2012	14.000.000,00	SPM Nomor 00103
8.	SPTB-09/T.1.16/Cu.3/12/2012	1.800.000,00	SPM Nomor 00102
9.	SPTB-10/T.1.16/Cu.3/12/2012	21.000.000,00	SPM Nomor 00102
10.	SPTB-11/T.1.16/Cu.3/12/2012	58.250.000,00	SPM Nomor 00099
11.	SPTB-12/T.1.16/Cu.3/12/2012	6.000.000,00	SPM Nomor 00101
12.	SPTB-13/T.1.16/Cu.3/12/2012	22.140.000,00	SPM Nomor 00101
13.	SPTB-14/T.1.16/Cu.3/12/2012	246.000.000,00	SPM Nomor 00105
14.	SPTB-15/T.1.16/Cu.3/12/2012	27.000.000,00	SPM Nomor 00100
15.	SPTB-16/T.1.16/Cu.3/12/2012	72.960.000,00	SPM Nomor 00100
No	Nomor SPTB	Jumlah (Rp)	Keterangan
16.	SPTB-17/T.1.16/Cu.3/12/2012	110.440.000,00	SPM Nomor 00108
17.	SPTB-18/T.1.16/Cu.3/12/2012	13.300.000,00	SPM Nomor 00095
18.	SPTB-19/T.1.16/Cu.3/12/2012	134.700.000,00	SPM Nomor 00095
	Sub Jumlah 1	1.002.770.000,00	
1.	SPTB-20/T.1.16/Cu.3/12/2012	21.129.000,00	SPM Nomor 00109
2.	SPTB-20/T.1.16/Cu.3/12/2012	1.514.000,00	SPM Nomor 00109
3.	SPTB-21/T.1.16/Cu.3/12/2012	17.357.000,00	SPM Nomor 00109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Jumlah 2	40.000.000,00	
Jumlah	1.042.770.000,00	

Sehingga dari pencairan dan penggunaan dana anggaran Kejaksaan Negeri Wamena Kejaksaan Negeri Wamena periode bulan Desember 2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Pencairan dan Pengembalian Sisa TUP bulan Desember 2012:

(1) Surat Perintah Pencairan Dana TUP	Rp 1.040.650.000,00
(2) Surat Perintah Pencairan Dana GUP	Rp 40.000.000,00
(3) Surat Setoran Bukan Pajak Sisa TUP	Rp (37.880.000,00)
Jumlah 1)	Rp 1.042.770.000,00

- 2) Pengeluaran yang Dapat Dipertanggungjawabkan:

(1) Biaya operasional perkara pidana umum	Rp 96.000.000,00
(2) Biaya honorarium 4 bulan	Rp 8.800.000,00
(3) Biaya BBM Kendaraan R. 4 (2 unit)	Rp 1.000.000,00
(4) Biaya telepon kantor	Rp 1.013.940,00
(5) Biaya pengadaan ATK – fotocopy	Rp 144.600
(6) Biaya pengiriman pos dan giro	Rp 47.970,00
(7) Penyetoran pajak-pajak	Rp 22.394.005,00
(8) Biaya operasional lainnya	Rp 5.000.000,00
Jumlah 2)	Rp 134.400.515,00

- 3) Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan: 1) – 2)

	Rp 908.369.485,00
--	-------------------

22. Bahwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wamena mengeluarkan Surat keputusan Nomor KEP- /T.1.16/Cu.3/01/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dan Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dengan susunan :

No	Nama	Jabatan
1.	I PUTU SUARJANA, SH, MH/ Kepala Kejaksaan Negeri Wamena	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	I PUTU SUARJANA, SH, MH/ Kepala Kejaksaan Negeri Wamena	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	ARIUS ABAMI, SH/Kasubagbin Kejari Wamena	Pejabat Penanda Tangan SPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	FIRMAN RACHMAN/Staf Pidum	Bendahara Pengeluaran
5.	SHELLY A. PEETOM, SH/Staf Pembinaan	Bendahara Penerimaan
6.	HEIN JIMI ANSANAY/ Staf Pidum	Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

23. Bahwa pada Tahun anggaran 2013 telah dilakukan pencairan dana anggaran kejaksaan Negeri Wamena sebesar Rp 2.509.810.200 (dua milyar lima ratus Sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) secara bertahap dalam periode Januari 2013 sampai dengan bulan September 2013 berupa Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan, Ganti Uang dan dana Langsung dengan rincian sebagai berikut :

A. Pencairan Uang Persediaan sebesar Rp.100.000.000,00 Tahun 2013

- Bahwa bulan Januari 2013 Terdakwa FIRMAN RACHMAN mengajukan pencairan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Belanja Barang, dengan cara membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dana UP Nomor : 00005/KEJAKSAAN-UP/2013 tanggal 30 Januari 2013, dan setelah ditanda tangani oleh ARIUS ABAMI, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) untuk penyediaan uang persediaan satuan kerja Kejaksaan Negeri Wamena, selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 927129Z/113/110 tanggal 31 Januari 2013, dan atas dasar SP2D tersebut pada tanggal 1 Februari 2013, I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama dengan Terdakwa FIRMAN RACHMAN menandatangani cek nomor CET 397949 untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp.100.000.000,00 dan uang tersebut diserahkan kepada I PUTU SUARJANA, SH, MH dan sebesar Rp40.000.000,00 dikembalikan lagi kepada Terdakwa FIRMAN RACHMAN untuk keperluan perkantoran seperti bayar listrik bulan Januari, ATK dan biaya yang tidak terduga dimana kadang kala I PUTU SUARJANA, SH, MH sering meminta uang dari Terdakwa FIRMAN RACHMAN;
- Bahwa atas pencairan tersebut selanjutnya Arius Abami, SH menandatangani 3 (tiga) buah SPM Ganti Uang Persediaan Nihil yang ditujukan ke KPPN Wamena, dan berdasarkan SPM Ganti UP Nihil tersebut, KPPN Wamena menerbitkan 3 (tiga) buah SP2D

Hal. 42 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan atas pertanggungjawaban uang persediaan sebesar

Rp100.000.000,00 untuk keperluan belanja barang sebagai berikut:

No	Pertanggungjawaban		Pengesahan dari KPPN		Nilai (Rp)
	SPM Ganti UP (Nihil)		SP2D Ganti UP (Nihil)		
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1.	00069	05-12-2013	931870Z/113/109	06-12-2013	28.200.000,00
2.	00070	05-12-2013	931871Z/113/109	06-12-2013	1.350.000,00
3.	00071	05-12-2013	931872Z/113/109	06-12-2013	70.450.000,00
Jumlah					100.000.000,00

B. Pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp787.700.000,00, Tahun 2013.

- Bahwa pada bulan Maret 2013 I PUTU SUARJANA, SH, MH memerintahkan Terdakwa FIRMAN RACHMAN untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp787.700.000,00, lalu Terdakwa FIRMAN RACHMAN membuat dokumen-dokumen berupa:
 - a. Surat Nomor B-62/T.1.16/Cu.3/02/2013 tanggal 1 Maret 2013 perihal Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp787.700.000,00 yang ditujukan kepada Kepala KPPN Wamena yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yakni I PUTU SUARJANA, SH, MH;
 - b. Surat Pernyataan Nomor B-61/T.1.16/Cu.3/02/2013 tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp787.700.000,00 yang ditanda tangani oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH;
- Bahwa Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp787.700.000,00 yang ditanda tangani oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH akan digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Program / Kegiatan	Nilai (Rp)
I.	Seksi Pidana Khusus	
1.	Penyelidikan Kasus Korupsi	65.350.000,00
2.	Penyidikan Kasus Korupsi	165.350.000,00
3.	Pra Penuntutan Perkara TP Korupsi	29.240.000,00
4.	Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi	427.760.000,00
	Sub Jumlah 1	687.700.000,00
II.	Seksi Intelijen	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN	
1.	Pengadaan Media Komunikasi	40.000.000,00
2.	Pengadaan Materi dan Brosur	40.000.000,00
3.	Konsumsi Sosialisasi Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN	14.000.000,00
4.	Biaya Saksi Ahli	6.000.000,00
	Sub Jumlah 2	100.000.000,00
	Jumlah	787.700.000,00

- Bahwa atas pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut, kemudian KPPN Wamena menandatangani Surat Nomor : S-212/WPB.33/KP.0502/2013 tanggal 4 Maret 2013 hal Persetujuan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp787.700.000,00 lalu FIRMAN RACHMAN membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Dana UP (UYHD) dan ditandatangani oleh ARIUS ABAMI, SH selaku PPSPM dan atas nama KPA Kejaksaan Negeri Wamena Nomor 00010 tanggal 4 Maret 2013 untuk penyediaan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp787.700.000,00 selanjutnya atas dasar SPM tersebut KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 927274Z/113/110 tanggal 5 Maret 2013, kemudian I PUTU SUARJANA, SH, MH ke BRI Cabang Wamena untuk melakukan pemindahbukuan ke Rekening Bank BRI Cabang Wamena nomor 031101000060308 atas nama Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Wamena;
- Bahwa setelah dana dipindahbukukan I PUTU SUARJANA, SH, MH dan 6 Maret 20013, I PUTU SUARJANA, SH.MH berangkat ke Jayapura kemudian sekitar tanggal 09 Maret Terdakwa FIRMAN RACHMAN juga ke Jayapura dan sesampai di Jayapura I PUTU SUARJANA, SH.MH menelepon Terdakwa FIRMAN RACHMAN untuk ketemu di hotel Horison Jayapura selanjutnya I PUTU SUARJANA, SH.MH memberikan Terdakwa FIRMAN RACHMAN uang sebesar Rp100.000.000,00., (seratus juta rupiah) dan Terdakwa berkata "ini kamu pakai untuk panjar mobil "Terdakwa FIRMAN RACHMAN menandatangani cek nomor 398952 senilai Rp855.381.600 di dalam jumlah tersebut termasuk penarikan tunai yang sumber dananya dari SP2D GU sebesar Rp56.059.500 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D LS sebesar Rp11.622.100 dan Terdakwa FIRMAN RACHMAN sendiri yang mengambil uang senilai Rp855.381.600 secara tunai namun sebagian diminta oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH untuk ditransfer uang tersebut ke rekening an. I PUTU SUARJANA, SH.MH, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selanjutnya dana sisanya Terdakwa FIRMAN RACHMAN bawa ke I PUTU SUARJANA, SH.MH dan selanjutnya sekitar tanggal;

- Bahwa dari dana yang telah dicairkan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan dana operasional dan tidak ada realisasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp787.700.000,00 namun sebelumnya Terdakwa FIRMAN RACHMAN sempat bertanya kepada I PUTU SUARJANA, SH.MH mengenai pertanggungjawabannya "buat saja dulu GU Nihil nya dan untuk pertanggungjawabannya nanti menyusul " tapi sampai sekarang belum juga dibuat namun sebagai pertanggungjawaban atas Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk keperluan belanja barang dengan jumlah sebesar Rp787.700.000,00 yang seolah-olah ada kegiatan, kemudian dibuatlah SPM Ganti UP Nihil, dan berdasarkan SPM Ganti UP Nihil tersebut, selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan SP2D pengesahan atas pertanggungjawaban uang persediaan untuk keperluan belanja barang dengan jumlah sebesar Rp787.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Pertanggungjawaban		Pengesahan dari KPPN		Nilai (Rp)
	SPM Ganti UP (Nihil)		SP2D Ganti UP (Nihil)		
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
Seksi Pidana Pidum dan Pidsus					
1.	00014	3 April 2013	927603Z/113/109	5 April 2013	230.700.000,00
2.	00015	3 April 2013	927604Z/113/109	5 April 2013	463.000.000,00
Sub jumlah 1					693.700.000,00
Seksi Intelijen					
3.	00016	3 April 2013	927605Z/113/109	April 2013	94.000.000,00
Sub jumlah 2					94.000.000,00
Jumlah					787.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp600.710.000,00 Tahun 2013

- Bahwa pada bulan April 2013 I PUTU SUARJANA, SH, MH memerintahkan Terdakwa FIRMAN RACHMAN untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp600.710.000,00, lalu I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku KPA Kejaksaan Negeri Wamena menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Nomor B-206/T.1.16/Cu.3/05/2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp600.710.000,00 yang ditujukan kepada Kepala KPPN Wamena;
 - b. Surat Pernyataan Nomor B-207/T.1.16/Cu.3/05/2013 tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp600.710.000,00;
- Bahwa pengajuan Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp600.710.000,00 yang ditanda tangani oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH akan digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan Kejaksaan Negeri Wamena pada bulan Mei 2013 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian Program / Kegiatan	Nilai (Rp)
	Seksi Pidana Khusus	
1.	Penyelidikan Kasus Korupsi	32.675.000,00
2.	Penyidikan Kasus Korupsi	82.675.000,00
	Seksi Pidana Khusus – Pra Penuntutan	
3.	Perkara TPK	14.620.000,00
4.	Penuntutan Perkara TPK	216.880.000,00
	Sub Jumlah 1	346.850.000,00
	Seksi Pidana Umum	
1.	Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Pidum	93.330.000,00
	Sub Jumlah 2	93.330.000,00
	Seksi Intelijen	
1.	Perkara Intelijen	160.530.000,00
	Sub Jumlah 3	160.530.000,00
	Jumlah 1 s.d. 3	600.710.000,00

- Bahwa atas pengajuan dana tersebut Kepala KPPN Wamena menandatangani Surat Nomor S-450/WPB.33/KP. 0502/2013 hal Persetujuan Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak belanja barang sebesar Rp600.710.000,00 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Negeri Wamena;

- Bahwa Pada tanggal 1 Mei 2013, Terdakwa FIRMAN RACHMAN membuat SPM yang ditandatangani oleh Arius Abami, S.H. selaku Pejabat Penandatangan SPM dan atas nama KPA Kejaksaan Negeri Wamena Nomor 00022 untuk penyediaan tambahan uang persediaan sebesar Rp600.710.000,00 berdasarkan SPM tersebut, KPPN Wamena selaku Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 927962Z/113/110 tanggal 2 Mei 2013 untuk penyediaan tambahan uang persediaan sebesar Rp600.710.000,00 dana UP (UYHD) dan dana tersebut masuk ke rekening BRI Cabang Wamena atas nama Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Wamena pada tanggal 2 Mei 2013;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013, I PUTU SUARJANA, SH, MH dan Terdakwa FIRMAN RACHMAN menandatangani cek nomor CET 398957 senilai Rp612.332.100. di dalam jumlah tersebut termasuk penarikan tunai yang sumber dananya dari SP2D LS sebesar Rp11.622.100 dan setelah dananya diambil, I PUTU SUARJANA, SH, MH menyuruh agar Terdakwa FIRMAN RACHMAN mentransfer ke rekening I PUTU SUARJANA, SH.MH sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya oleh Terdakwa FIRMAN RACHMAN diserahkan kepada I PUTU SUARJANA kemudian sorenya setelah pulang kantor Terdakwa FIRMAN RACHMAN oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH di beri uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sambil mengatakan "ini kamu ambil untuk keluarga ";
- Bahwa atas pencairan dana tersebut I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama Terdakwa FIRMAN RACHMAN tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana operasional dan tidak ada realisasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp600.710.000,00 namun sebagai pertanggungjawaban atas Tambahan Uang Persediaan (TUP) dibuatlah seolah-olah ada kegiatan, dengan membuat SPM Ganti UP Nihil, selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan SP2D pengesahan atas pertanggungjawaban uang persediaan untuk

Hal. 47 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan belanja barang dengan jumlah sebesar Rp600.710.000,00

dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pertanggungjawaban		Pengesahan dari KPPN		Nilai (Rp)
	SPM Ganti UP (Nihil)		SP2D Ganti UP (Nihil)		
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
Seksi Pidana Khusus					
1.	00028	22 Mei 2013	928258Z/113/109	23 Mei 2013	115.350.000,00
2.	00029	22 Mei 2013	928259Z/113/109	23 Mei 2013	177.500.000,00
3.	00034	22 Mei 2013	928283Z/113/109	24 Mei 2013	104.250.000,00
Sub jumlah 1					397.100.000,00
Seksi Pidana Umum					
1.	00030	22 Mei 2013	928260Z/113/109	23 Mei 2013	93.330.000,00
Sub jumlah 2					93.330.000,00
Seksi Intelijen					
1.	00031	22 Mei 2013	928282Z/113/109	24 Mei 2013	27.280.000,00
2.	00032	22 Mei 2013	928262Z/113/109	23 Mei 2013	62.910.000,00
3.	00033	22 Mei 2013	928263Z/113/109	23 Mei 2013	20.090.000,00
Sub jumlah 3					110.280,00
Jumlah					600.710.000,00

D. Pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp310.700.000,00 Tahun 2013.

- Bahwa pada bulan Juli 2013 I PUTU SUARJANA, SH, MH memerintahkan Terdakwa FIRMAN RACHMAN untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp310.700.000,00, lalu I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Negeri Wamena menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Nomor B-265/T.1.16/Cu.3/07/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp310.700.000,00 yang ditujukan kepada Kepala KPPN Wamena;
 - c. Surat Pernyataan Nomor B- /T.1.16/Cu.3/07/2013 tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp310.700.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan pencairan dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp310.700.000,00 akan digunakan oleh Kejaksaan Negeri Wamena untuk melaksanakan program/kegiatan pada bulan Juli 2013 dengan rangkuman kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian Program / Kegiatan	Nilai (Rp)
	Seksi Pidana Khusus	
1.	Pra Penuntutan dan Penuntutan TP Khusus Lainnya	21.260.000,00
2.	Persidangan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya	29.370.000,00
	Sub Jumlah 1	50.630.000,00
	Seksi Pidana Umum	
1	Pra Penuntutan dan Penuntutan Tindak Pidana Pidum	161.455.000,00
	Sub Jumlah 2	161.455.000,00
	Seksi Intelijen	
1.	Penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejari/Cabang Kejari	67.200.000,00
	Sub Jumlah 3	67.200.000,00
	Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
1.	Penegakan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	11.115.000,00
2.	Operasional Pos Media Informasi & Yankum Gratis	31.415.000,00
	Sub Jumlah 4	42.530.000,00
	Jumlah 1 s.d. 4	310.700.000,00

pada tanggal 24 Juli 2013, KPPN Wamena menandatangani Surat Nomor :S-758/WPB.33/KP. 0502/2013 perihal Persetujuan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp310.700.000,00 untuk keperluan mendesak belanja barang yang ditujukan kepada I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Negeri Wamena, lalu berdasarkan surat tersebut Terdakwa FIRMAN RACHMAN membuat SPM yang kemudian ditandatangani oleh Arius Abami, S.H. selaku Pejabat Penandatangan SPM Nomor 00048 sebesar Rp310.700.000,00 dan berdasarkan SPM tersebut, KPPN Wamena selaku Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 929395Z/113/110 tanggal 24 Juli 2013 dan dana tersebut masuk ke rekening BRI Cabang Wamena atas nama Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Wamena pada tanggal 24 Juli 2013;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2013, I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama dengan Terdakwa FIRMAN RACHMAN menandatangani cek nomor CET 398966 senilai Rp310.700.000,00 lalu Terdakwa FIRMAN RACHMAN mengambil sendiri uang di Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan kepada I PUTU SUARJANA, SH, MH selanjutnya Terdakwa FIRMAN RACHMAN di beri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sambil I PUTU SUARJANA, SH., MH berkata "ini untuk kau pegang";

- Bahwa atas pencairan dana tersebut I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama Rp310.700.000,00 namun dibuatlah seolah-olah ada kegiatan, kemudian Terdakwa FIRMAN RACHMAN membuat SPM Ganti UP Nihil, dan selanjutnya KPPN Wamena dengan Terdakwa FIRMAN RACHMAN tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana operasional dan tidak ada realisasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan sebesar menerbitkan SP2D pengesahan atas pertanggungjawaban uang persediaan untuk keperluan belanja barang dengan jumlah sebesar Rp310.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pertanggungjawaban		Pengesahan dari KPPN		Nilai (Rp)
	SPM Ganti UP (Nihil)		SP2D Ganti UP (Nihil)		
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
Seksi Pidana Khusus					
1.	00053	20 -8- 2013	929749Z/113/109	21 -8-2013	37.910.000,00
Sub jumlah 1					37.910.000,00
Seksi Pidana Umum					
1.	00052	20 -8- 2013	929748Z/113/109	21 -8- 2013	174.175.000,00
Sub jumlah 2					174.175.000,00
Seksi Intelijen					
1.	00050	20 -8- 2013	929746Z/113/109	21 -8- 2013	23.640.000,00
2.	00051	20 -8- 2013	929747Z/113/109	21 -8-2013	43.560.000,00
Sub jumlah 3					67.200.000,00
Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara					
1.	00054	20 -8- 2013	929750Z/113/109	21 -8- 2013	11.115.000,00
2.	00055	20 -8-2013	929751Z/113/109	21 -8- 2013	20.300.000,00
Sub jumlah 4					31.415.000,00
Jumlah					310.700.000,00

E. Bahwa antara tanggal 1 Maret 2013 s/d tanggal 30 September 2013 Terdakwa FIRMAN RACHMAN telah membuat 11 (sebelas) SPM Ganti Uang (GU) sebesar Rp623.315.500,

- Bahwa Terdakwa FIRMAN RACHMAN membuat 11 (sebelas) Surat Perintah Membayar Ganti Uang (GU) Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp623.315.500 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ARIUS ABAMI, SH lalu di kirimkan ke KPPN Wamena dan berdasarkan SPM GU tersebut, selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan 11 (sebelas) SP2D GU Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang dengan rincian sbb :

No	SPM Ganti Uang (GU)		SP2D Ganti Uang (GU)		Jumlah (Rp)
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1.	00011	4 -3- 2013	927273Z/113/110	5 -3- 2013	56.059.500
2.	00013	22 -3- 2013	927504Z/113/110	25 -3- 2013	62.814.500
3.	00018	4 -4- 2013	927602Z/113/110	5 -4- 2013	100.000.000,00
4.	00021	21 -5- 2013	928257Z/113/110	23 -5- 2013	58.614.500
5.	00038	13 -6- 2013	928687Z/113/110	13 -6- 2013	58.614.500
6.	00040	4 -7- 2013	929016Z/113/110	5 -7- 2013	64.825.000,00
7.	00047	19 -7- 2013	929269Z/113/110	19 -7- 2013	85.017.500
8.	00056	20 -8- 2013	929752Z/113/110	21 -8- 2013	80.300.000,00
9.	00058	12 -9- 2013	930130Z/113/110	13 -9- 2013	11.000.000,00
10.	00059	12 -9- 2013	930131Z/113/110	13 -9- 2013	12.570.000,00
11.	00060	12 -9- 2013	930132Z/113/110	13 -9- 2013	33.500.000,00
Jumlah					623.315.500

- Bahwa Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang sebesar Rp623.315.500 berdasarkan rincian program/kegiatan adalah untuk :

No	Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)
I.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	
1.	Belanja Keperluan Perkantoran	144.839.750,00
2.	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	6.500.000,00
3.	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	72.330.000,00
4.	Belanja Barang Operasional Lainnya	19.800.000,00
5.	Belanja Langganan Listrik	19.397.500
6.	Belanja Langganan Telepon	19.400.000,00
7.	Belanja Jasa Pos dan Giro	34.800.000,00
8.	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105.555.250,00
9.	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	110.323.000,00
	Sub Jumlah 1	532.945.500
II.	Penyelenggaraan Non Operasional Perkantoran	
1.	Belanja Bahan	38.300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	52.070.000,00
	Sub Jumlah 2	90.370.000,00
	Jumlah	623.315.500

- Bahwa selanjutnya antara 1 Maret 2013 sampai dengan 30 September 2013 I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama dengan Terdakwa FIRMAN RACHMAN melakukan penarikan tunai dengan menandatangani cek dengan rincian sebagai berikut:

No.	Cek		Tanggal Penarikan Tunai	Jumlah (Rp)
	Nomor	Tanggal		
1.	CET 398952	5 Maret 2013	5 Maret 2013	56.059.500 (nilai cek Rp.855.381.600 karena gabung dengan TUP Maret 2013)
2.	CET 398953	28 Maret 2013	28 Maret 2013	62.814.500 (nilai cek Rp.104.717.300 karena gabung dengan LS)
3.	CET 398954	5 April 2013	5 April 2013	100.000.000,00
4.	CET 398958	23 Mei 2013	23 Mei 2013	58.614.500
5.	CET 398961	14 Juni 2013	14 Juni 2013	58.614.500
6.	CET 398962	5 Juli 2013	5 Juli 2013	64.825.000,00 (nilai cek 70.636.000,00 gabung dengan LS)
7.	CET 398965	19 Juli 2013	19 Juli 2013	85.017.500
8.	CET 398967	21 August 2013	21 August 2013	80.300.000,00
9.	CET 398969	13 September 2013	13 September 2013	57.070.000,00
	Jumlah			623.315.500

- Bahwa I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama Terdakwa FIRMAN RACHMAN tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana operasional sebagaimana tersebut dan tidak ada realisasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp623.315.500 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Bahwa antara tanggal 1 Maret 2013 s/d 31 Juli 2013 Terdakwa FIRMAN RACHMAN telah membuat 8 (delapan) SPM Langsung (LS) sebesar Rp87.384.700 untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa.

- Bermula Terdakwa FIRMAN RACHMAN membuat 8 (delapan) SPM Langsung (LS) dan ditandatangani oleh ARIUS ABAMI, SH untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp87.384.700. Lalu di kirim ke KPPN Wamena, selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan 8 (delapan) SP2D Langsung (LS) sebesar Rp87.384.700 untuk Keperluan Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa;
- Bahwa Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp87.384.700 berdasarkan SPM LS dan SP2D LS adalah sebagai berikut:

Surat Perintah Dinas		SPM LS		SP2D LS		Jumlah (Rp)
No	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
-	19-02-2013	00009	19-2-2013	927203Z	20-2-2013	24.224.200
0	21-2-2013	00008	04-3-2013	927293Z	05-3-2013	11.622.100
06	30-4-2013	00020	25-4-2013	927889Z	26-4-2013	11.622.100
07	05-5-2013	00023	02-5-2013	927961Z	02-5-2013	11.622.100
08	10-6-2013	00036	04-6-2013	928516Z	05-6-2013	11.622.100
09	25-6-2013	00041	04-7-2013	929017Z	05-7-2013	5.811.050,00
11	05-7-2013	00045	16-7-2013	929203Z	16-7-2013	5.050.000,00
12	16-7-2013	00046	16-7-2013	929212Z	16-7-2013	5.811.050,00
Jumlah						87.384.700

- Bahwa selanjutnya dalam periode 1 Februari 2013 sampai dengan 31 Juli 2013, I PUTU SUARJANA, SH, MH bersama dengan Terdakwa FIRMAN RACHMAN melakukan penarikan tunai dengan menandatangani cek dengan rincian sebagai berikut:

No	Cek		Tanggal Penarikan	Jumlah (Rp)
	Nomor	Tanggal	Tunai	
1.	CET 397950	20 Februari 2013	20 Februari 2013	24.224.200
2.	CET 398952	5 Maret 2013	5 Maret 2013	11.622.100 (nilai cek 855.381.600 gabung dengan TUP dan GU)
3.	CET 398956	29 April 2013	29 April 2013	11.622.100
4.	CET	2 Mei 2013	2 Mei 2013	11.622.100 (nilai cek

Hal. 53 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	398957			612.332.100 gabung dengan TUP)
5.	CET 398960	5 Juni 2013	5 Juni 2013	11.622.100
6.	CET 398962	5 Juli 2013	5 Juli 2013	5.811.050,00 (nilai cek 70.636.050,00 gabung dengn GU)
7.	CET 398965	16 Juli 2013	16 Juli 2013	10.861.050,00 (nilai cek 85.017.500 gabung dengan GU)
	Jumlah			87.384.700

- Bahwa penggunaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan oleh I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama Terdakwa FIRMAN RACHMAN selaku Bendahara Pengeluaran Kejari Wamena pada periode Januari sampai dengan September 2013 dari pencairan dana sebesar Rp2.509.810.200 adalah sebesar Rp242.512.266,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
I.	Biaya Operasional Jaksa / staf Jaksa	
1.	Fransiska L.Wonmaly, S.H./Kepala Seksi Pidsus	25.000.000,00
2.	Teguh Basuki Heru Y., M.H. /Kepala Seksi Pidum	10.000.000,00
3.	Filemon Ketaren, S.H. /Kepala Seksi Perdatun	10.000.000,00
4.	Nixon N. Mahuse, S.H., M.H. /Kepala Seksi Intel	10.000.000,00
5.	Vallerianus CD Sawaki, S.H./Jaksa Fungsional	10.000.000,00
6.	Ricarda Arsenius, S.H. /Jaksa Fungsional	10.000.000,00
7.	Naman Medlama	5.000.000,00
8.	Aryus Bisay/Kaur Perlengkapan	5.000.000,00
	Sub Jumlah I	85.000.000,00
No.	Uraian	Jumlah (Rp)
II.	Biaya /Honorarium Pengelola Satker	
1.	I Putu Suarjana, S.H., M.H./KPA	9.990.000,00
2.	Arius Abami	2.700.000,00

Hal. 54 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Shally A. Peetom, S.H./Bendahara Penerimaan	1.680.000,00
4.	Firman Rachman/Bendahara Pengeluaran	6.930.000,00
5.	Philipus Sapranim	3.000.000,00
6.	Jayrus Sief	1.000.000,00
7.	Beni Sief	1.000.000,00
	Sub Jumlah II	26.300.000,00
III.	Biaya Operasional Kantor	
1.	Biaya Perjalanan Dinas	87.384.700
2.	Biaya Telepon	4.726.706,00
3.	Biaya Listrik (PT PLN) – 3 no. Rek	1.637.100
4.	Biaya pengiriman Pos dan Giro	104.960,00
5.	Biaya Pengadaan ATK- fotocopy	3.358.800
6.	Biaya BBM Kendaraan Dinas Roda 4 (2 unit)	9.000.000,00
7.	Penggantian biaya service kendaraan	25.000.000,00
	Sub Jumlah III	131.212.266,00
	Jumlah I s.d. III	242.512.266,00

Sehingga penggunaan anggaran Kejaksaan Negeri Wamena untuk periode Januari s/d September 2013 yaitu :

1. Pencairan dana periode Januari s/d September 2013 :
 - a. SPM TUP/SP2D PTUP (dari TUP) Rp1.699.110.000,00
 - b. SPM GU/SP2D GU (dari GU) Rp 623.315.500
 - c. SPM UP/SP2D GUP (dari UP) Rp 100.000.000,00
 - d. SPM LS/SP2D LS Rp 87.384.810,00
 - Jumlah 1 Rp2.509.810.200
2. Pengeluaran yang dapat di pertanggung jawabkan :
 - a. Biaya operasional Jaksa Rp 85.000.000,00
 - b. Biaya honorarium pengelolaan Satker Rp 26.300.000,00
 - c. Biaya telepon kantor Rp 4.726.706,00
 - d. Biaya pengadaan ATK/photo copy Rp 3.358.800
 - e. Biaya Listrik Rp 1.637.100
 - f. Biaya pengiriman pos dan giro Rp 104.960,00
 - g. Biaya BBM kendaraan dinas Rp 9.000.000,00
 - h. Biaya perjalanan dinas Rp 87.384.700
 - i. Penggantian biaya servis kendaraan Rp 25.000.000,00
 - Jumlah 2 Rp242.297.934,00

Hal. 55 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan : 1 – 2 sebesar Rp2.267.297.934.000,00;
24. Bahwa dalam hal pengelolaan anggaran pada Kejaksaan Negeri Wamena Terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Pengguna Anggaran bersama FIRMAN RACHMAN selaku Bendahara Pengeluaran Kejari Wamena dalam Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 telah melakukan perbuatan tidak sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya;
25. Bahwa terhadap pengelolaan anggaran pada Kejaksaan Negeri Wamena I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Pengguna Anggaran bersama dengan Terdakwa FIRMAN RACHMAN selaku Bendahara Pengeluaran Kejari Wamena dalam Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3.175.667.419,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sbb :

1) Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2012 (bulan Desember 2012)					
(1)	Realisasi Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana berdasarkan jenis SPM/SP2D:				
	a. SPM TUP/SP2D TUP	Rp	1.040.650.000,00		
	b. Setoran Pengembalian TUP	Rp	37.880.000,00		
	d. SPM/SP2D GU Nihil (a-b)	Rp	1.002.770.000,00		
	d. SPM GU/SP2D GU Nihil (dari GU)	Rp	40.000.000,00		
	Sub Jumlah (1) c+d			Rp	1.042.770,00
(2)	Pengeluaran yang Dapat Dipertanggungjawabkan:				
	a. Honorarium Pengelola Anggaran	Rp	8.800.000,00		
	b. Biaya Operasional Seksi-Seksi	Rp	96.000.000,00		
	c. Operasional Perkantoran	Rp	2.206.510,00		
	d. Penyetoran Pajak	Rp	22.394.005,00		
	e. Operasional Lainnya	Rp	5.000.000,00		
	Sub Jumlah (2)			Rp	134.400.515,00
	Kerugian Keuangan Negara (1) – (2)			Rp	908.369.485,00

Hal. 56 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2013 (Periode Januari s.d. September 2013)			
(1)	Realisasi Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana berdasarkan jenis SPM/SP2D:			
	a.SPM TUP/SP2D PTUP (dari TUP)	Rp	1.699.110.000,00	
	b.SPM GU/SP2D GU (dari GU)	Rp	623.315.500	
	c.SPM UP/SP2D GUP Nihil (dari UP)	Rp	100.000.000,00	
	d SPM LS/SP2D LS	Rp	87.384.700	
	Sub Jumlah (1)			Rp 2.509.810.200, 00
(2)	Pengeluaran yang Dapat Dipertanggungjawabkan:			
	a.Honorarium Pengelola Anggaran	Rp	26.300.000,00	
	b Biaya Operasional Seksi-Seksi	Rp	85.000.000,00	
	c.Biaya Operasional Perkantoran	Rp	43.827.566,00	
	d. Belanja Perjalanan Dinas	Rp	87.384.700	
	Sub Jumlah (2)			Rp 242.512.266,00
	Kerugian Keuangan Negara (1) – (2)			Rp 2.267.297.934,00
	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2012/2013:1)+2)			Rp 3.175.667.419,00

Sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-879/PW26/5/2014 tanggal 29 April 2014 sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;

Mahkamah Agung Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Jayapura tanggal 10 Juli 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN RACHMAN bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut hingga menyebabkan kerugian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN RACHMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara. dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiare 6 (enam) bulan penjara dan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Barang Bukti berupa dokumen-dokumen yaitu :
 1. Surat Pengajuan SPM yang ditanda tangani oleh PPSPM (Pejabat Penandatanganan SPM);
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) KPPN Wamena kepada Bank Pembayar;
 3. Rencana Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP);
 4. Surat Permohonan ke KPPN Wamena untuk Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kejaksaan Negeri Wamena;
 5. Laporan Pertanggungjawaban Bulanan bendahara Kejaksaan Negeri Wamena TA 2012 sampai dengan TA 2013;

Hal. 58 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel SK Kajari Wamena Nomor: KEP-36/T.1.16/Cu.3/12/2012 Tentang Penggantian Bendahara Pengeluaran pada Kejaksaan Negeri Wamena ditetapkan di Wamena pada Tanggal 10 Desember 2012 ditandatangani Kajari Wamena I PUTU SUARJANA, SH,MH;
7. Dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satker (Satuan Kerja) Kejaksaan Negeri Wamena, nomor : DIPA-0453/006.01.2.01/30/2012 Tahun Anggaran 2012;
8. Dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satker (Satuan Kerja) Kejaksaan Negeri Wamena, nomor : DIPA-006.01.2.008991/2013 Tahun Anggaran 2013;
9. 1 (satu) rangkap dokumen surat pengantar SP-1611/WPB.30/BD.0204/2013 pengesahan Nomor SP DIPA SP-006.01.2.008991/AG/2013 tanggal 05-12-2012 Pagu Dana 3.942.049.000,00
10. 1 (satu) bundel Dokumen Rincian Pagu DIPA Per Akun Tahun Anggaran 2013;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013;
12. 6 (enam) lembar kuitansi honor PNPB perbulan Rp.420.000,00 dibayar dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun 2013 yang ditandatangani oleh Shally Peetom;
13. 1 (satu) lembar kuitansi honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) perbulan Rp.1.110.000,00 dibayar dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh I Putu Suarjana;
14. 1 (satu) lembar kuitansi honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perbulan Rp.930.000,00 dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh Arius Abami;
15. 1 (satu) lembar kuitansi honor Bendahara Pengeluaran bulan Maret sampai dengan Mei 2013 Rp.2.790.000,00;
- 16 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Dinas Pariwisata Kab.Jaya Wijaya T.A 2013 sebesar Rp.30.000.000,00 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Nikson N,SH.MH;
16. 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Tipikor Dinas Pariwisata Kab.Jaya Wijaya T.A 2013 sebesar Rp.30.000.000,00 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Fransiska L.W,SH;

Hal. 59 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Penyidikan T.A 2013 sebesar Rp.10.000.000,00 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Aryus Bisai,SH;
18. 1 (satu) lembar kuitansi honor antar Jemput Tahanan T.A 2013 Perkara Pidum sebesar Rp.15.000.000,00 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Naman Medlama;
19. 1 (satu) lembar kuitansi honor Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara T.A 2013 sebesar Rp.15.000.000,00 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Filemon Ketaren,SH;
20. 1 (satu) lembar Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00092/KEJAKSAAN-UP/2012 tanggal 22-11-2012 sebesar Rp1.040.650.000,00 (SATU MILYAR EMPAT PULUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk Satker Kejaksaan Negeri Wamena;
21. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) kepada KEPALA KANWIL XXX DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN di Jayapura Nomor : B / 1051 / T.1.16 / Cu.3 / 11 / 2012. Tanggal 19 Nopember 2012 yang ditandatangani I Putu Suarjana. SH;
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggal 19 Nopember 2012 yang ditandatangani I Putu Suarjana. SH;
23. 1 (satu) lembar Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang ditandatangani I Putu Suarjana, SH;
24. 1 (satu) lembar Rencana Kas Bulanan TA 2012 tertanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani I Putu Suarjana,SH;
25. 1 (satu) lembar Laporan realisasi Anggaran Satuan Kerja untuk semester yang berakhir 31 Desember 2012 tanggal 03 desember 2012;
26. 1 (satu) lembar Laporan Posisi Pertanggal 31 desember 2012 Tahun Anggaran 2012 Tanggal 3 desember 2012;
27. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN untuk Bulan yang berakhir 31 Oktober 2012;
28. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00095/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp148.000.000,00 (SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar

Hal. 60 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.148.000.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;

29. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00099/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp58.250.000,00 (LIMA PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.58.250.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
30. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00106/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp84.990.000,00 (DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS RIBU SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.84.990.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
31. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00101/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp28.140.000,00 (DUA PULUH DELAPAN SERATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.28.140.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
32. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00102/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp22.800.000,00 (DUA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.22.800.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
33. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00103/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp16.400.000,00 (ENAM BELAS JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.16.400.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
34. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00105/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-

Hal. 61 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12-2012 sebesar Rp246.000.000,00 (DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp246.000.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
35. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00104/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp152.300.000,00 (SERATUS LIMA PULUH DUA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.152.300.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
36. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00100/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp99.960.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.99.960.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
37. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00107/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp20.090.000,00 (DUA PULUH JUTA SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.20.090.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
38. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00108/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp110.440.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh rupiah) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.110.440.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
39. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00109/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp40.000.000,00 (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.40.000.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
40. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00096/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 06-

Hal. 62 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-2012 sebesar Rp40.000.000,00 (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH)

Uraian Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang;

41. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00093/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 12-11-2012 sebesar Rp18.125.000,00 (DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang;
42. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00092/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 12-11-2012 sebesar Rp21.500.000,00 (DUA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang;
43. 1 (satu) bundel Dokumen SPPD atas nama I PUTU SUARAJANA, SH.,MH ditandatangani I PUTU SUARAJANA, SH.,MH;
44. 1 (satu) lembar Kenaikan Gaji Berkala An.FIRMAN RACHMAN tanggal 01 November 2012 ditandatangani I PUTU SUARAJANA, SH.,MH;
45. 1 (satu) lembar foto copian SK. CPNS An. FIRMAN RACHMAN;
46. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena tentang pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dan Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Kejaksaan Negeri Wamena Tahun Anggaran 2013;
47. Nomor Cek 397944 tanggal 4 Desember 2012 senilai Rp1.042.836.100;
48. Nomor Cek 397946 tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp69.308.550,00;
49. Nomor Cek 397949 tanggal 1 Pebruari 2013 senilai Rp100.000.000,00;
50. Nomor Cek 397950 tanggal 20 Pebruari 2013 senilai Rp24.224.200;
51. Nomor Cek 398951 tanggal 26 Pebruari 2013 senilai Rp39.998.8000;
52. Nomor Cek 398952 tanggal 5 Maret 2013 senilai Rp855.381.600;
53. Nomor Cek 398953 tanggal 29 Maret 2013 senilai Rp104.717.300;
54. Nomor Cek 398954 tanggal 5 April 2013 senilai Rp100.000.000,00;
55. Nomor Cek 398956 tanggal 29 April 2013 senilai Rp11.622.100;
56. Nomor Cek 398957 tanggal 2 Mei 2013 senilai Rp612.332.100;
57. Cek 398958 tanggal 23 Mei 2013 senilai Rp58.614.500;
58. Nomor Cek 398960 tanggal 5 Juni 2013 senilai Rp11.622.100;
59. Nomor Cek 398961 tanggal 14 Juni 2013 senilai Rp58.614.500;
60. Nomor Cek 398962 tanggal 5 Juli 2013 senilai Rp70.636.050,00;
61. Nomor Cek 398965 tanggal 19 Juli 2013 senilai Rp85.017.500;

Hal. 63 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Nomor Cek 398966 tanggal 24 Juli 2013 senilai Rp310.700.000,00;
63. Nomor Cek 398967 tanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp80.300.000,00;
64. Nomor Cek 398968 tanggal 10 September 2013 senilai Rp42.188.400;
65. Nomor Cek 398969 tanggal 13 September 2013 senilai Rp57.070.000,00;
66. Nomor Cek 398970 tanggal 4 Oktober 2013 senilai Rp42.188.400;

Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Wamena;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap. tanggal 20 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN RACHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FIRMAN RACHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tidak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menghukum Terdakwa FIRMAN RACHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan Pidana tambahan terhadap Terdakwa oleh karena itu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp210.000.000,00.- (dua ratus sepuluh Juta, rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa dokumen dan surat-surat antara lain :
 1. Surat Pengajuan SPM yang ditanda tangani oleh PPSPM (Pejabat Penandatanganan SPM);
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) KPPN Wamena kepada Bank Pambayar;

Hal. 64 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rencana Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP);
4. Surat Permohonan ke KPPN Wamena untuk Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kejaksaan Negeri Wamena;
5. Laporan Pertanggungjawaban Bulanan bendahara Kejaksaan Negeri Wamena TA 2012 sampai dengan TA 2013;
6. 1 (satu) bundel SK Kajari Wamena Nomor: KEP-36/T.1.16/Cu.3/12/2012 Tentang Penggantian Bendahara Pengeluaran pada Kejaksaan Negeri Wamena ditetapkan di Wamena pada Tanggal 10 Desember 2012 ditandatangani Kajari Wamena I PUTU SUARJANA, SH,MH;
7. Dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satker (Satuan Kerja) Kejaksaan Negeri Wamen, nomor : DIPA-0453/006.01.2.01/30/2012 Tahun Anggaran 2012
8. Dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satker (Satuan Kerja) Kejaksaan Negeri Wamena, nomor : DIPA-006.01.2.008991/2013 Tahun Anggaran 2013.
9. 1 (satu) rangkap dokumen surat pengantar SP-1611/WPB.30/BD.0204/2013 pengesahan Nomor SP DIPA SP-006.01.2.008991/AG/2013 tanggal 05-12-2012 Pagu Dana 3.942.049.000,00 ;
10. 1 (satu) bundel Dokumen Rincian Pagu DIPA Per Akun Tahun Anggaran 2013;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013;
12. 6 (enam) lembar kuitansi honor PNPB perbulan Rp.420.000,00 dibayar dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun 2013 yang ditandatangani oleh Shally Peetom;
13. 1 (satu) lembar kuitansi honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) perbulan Rp.1.110.000,00 dibayar dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh I Putu Suarjana;
14. 1 (satu) lembar kuitansi honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perbulan Rp.930.000,00 dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh Arius Abami;
15. 1 (satu) lembar kuitansi honor Bendahara Pengeluaran bulan Maret sampai dengan Mei 2013 Rp.2.790.000,00;
16. 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Dinas Pariwisata Kab.Jaya Wijaya T.A 2013 sebesar Rp.30.000.000,00 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Nikson N,SH,MH;

Hal. 65 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Tipikor Dinas Pariwisata Kab.Jaya Wijaya T.A 2013 sebesar Rp.30.000.000,00 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Fransiska L.W,SH;
18. 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Penyidikan T.A 2013 sebesar Rp.10.000.000,00 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Aryus Bisai,SH;
19. 1 (satu) lembar kuitansi honor antar Jemput Tahanan T.A 2013 Perkara Pidum sebesar Rp.15.000.000,00 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Naman Medlama;
20. (satu) lembar kuitansi honor Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara T.A 2013 sebesar Rp.15.000.000,00 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Filemon Ketaren,SH.;
21. 1 (satu) lembar Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00092/KEJAKSAAN-UP/2012 tanggal 22-11-2012 sebesar Rp1.040.650.000,00 (SATU MILYAR EMPAT PULUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk Satker Kejaksaan Negeri Wamena;
22. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) kepada KEPALA KANWIL XXX DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN di Jayapura Nomor : B / 1051 / T.1.16 / Cu.3 / 11 / 2012. Tanggal 19 Nopember 2012 yang ditandatangani I Putu Suarjana. SH;
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggal 19 Nopember 2012 yang ditandatangani I Putu Suarjana. SH;
24. 1 (satu) lembar Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang ditandatangani I Putu Suarjana, SH
25. 1 (satu) lembar Rencana Kas Bulanan TA 2012 tertanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani I Putu Suarjana,SH;
26. 1 (satu) lembar Laporan realisasi Anggaran Satuan Kerja untuk semester yang berakhir 31 Desember 2012 tanggal 03 desember 2012;
27. 1 (satu) lembar Laporan Posisi Pertanggal 31 desember 2012 Tahun Anggaran 2012 Tanggal 3 desember 2012;
28. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN untuk Bulan yang berakhir 31 Oktober 2012;
29. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00095/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp148.000.000,00 (SERATUS EMPAT PULUH

Hal. 66 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DELAPAN JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.148.000.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
30. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00099/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp58.250.000,00 (LIMA PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.58.250.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
 31. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00106/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp84.990.000,00 (DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS RIBU SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.84.990.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
 32. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00101/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp28.140.000,00 (DUA PULUH DELAPAN SERATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.28.140.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
 33. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00102/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp22.800.000,00 (DUA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.22.800.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.;
 34. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00103/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp16.400.000,00 (ENAM BELAS JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar

Hal. 67 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.400.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;

35. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00105/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp246.000.000,00 (DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp246.000.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
36. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00104/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp152.300.000,00 (SERATUS LIMA PULUH DUA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.152.300.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
37. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00100/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp99.960.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.99.960.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
38. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00107/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp20.090.000,00 (DUA PULUH JUTA SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.20.090.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
39. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00108/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp110.440.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh rupiah) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.110.440.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;

Hal. 68 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00109/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp40.000.000,00 (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.40.000.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
41. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00096/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 06-12-2012 sebesar Rp40.000.000,00 (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang;
42. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00093/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 12-11-2012 sebesar Rp18.125.000,00 (DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang;
43. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM : 00092/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 12-11-2012 sebesar Rp21.500.000,00 (DUA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang;
44. 1 (satu) bundel Dokumen SPPD atas nama I PUTU SUARAJANA, SH.,MH ditandatangani I PUTU SUARAJANA, SH.,MH;
45. 1 (satu) lembar Kenaikan Gaji Berkala An.FIRMAN RACHMAN tanggal 01 November 2012 ditandatangani I PUTU SUARAJANA, SH.,MH;
46. 1 (satu) lembar foto copian SK. CPNS An. FIRMAN RACHMAN;
47. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena tentang pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dan Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Kejaksaan Negeri Wamena Tahun Anggaran 2013;
48. Nomor Cek 397944 tanggal 4 Desember 2012 senilai Rp1.042.836.100
49. Nomor Cek 397946 tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp69.308.550;
50. Nomor Cek 397949 tanggal 1 Pebruari 2013 senilai Rp100.000.000,00;
51. Nomor Cek 397950 tanggal 20 Pebruari 2013 senilai Rp24.224.200;
52. Nomor Cek 398951 tanggal 26 Pebruari 2013 senilai Rp39.998.8000;
53. Nomor Cek 398952 tanggal 5 Maret 2013 senilai Rp855.381.600;

Hal. 69 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Nomor Cek 398953 tanggal 29 Maret 2013 senilai Rp104.717.300;
55. Nomor Cek 398954 tanggal 5 April 2013 senilai Rp100.000.000,00;
56. Nomor Cek 398956 tanggal 29 April 2013 senilai Rp11.622.100;
57. Nomor Cek 398957 tanggal 2 Mei 2013 senilai Rp612.332.100;
58. Cek 398958 tanggal 23 Mei 2013 senilai Rp58.614.500;
59. Nomor Cek 398960 tanggal 5 Juni 2013 senilai Rp11.622.100;
60. Nomor Cek 398961 tanggal 14 Juni 2013 senilai Rp58.614.500;
61. Nomor Cek 398962 tanggal 5 Juli 2013 senilai Rp70.636.050,00;
62. Nomor Cek 398965 tanggal 19 Juli 2013 senilai Rp85.017.500;
63. Nomor Cek 398966 tanggal 24 Juli 2013 senilai Rp310.700.000,00;
64. Nomor Cek 398967 tanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp80.300.000,00;
65. Nomor Cek 398968 tanggal 10 September 2013 senilai Rp.42.188.400,;
66. Nomor Cek 398969 tanggal 13 September 2013 senilai Rp.57.070.000,00;
67. Nomor Cek 398970 tanggal 4 Oktober 2013 senilai Rp42.188.400,;
Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Wamena ;
9. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT.JAP. tanggal 16 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Wamena tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 19 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, besarnya denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa: FIRMAN RACHMAN tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa: FIRMAN RACHMAN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidair ;
 4. Menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa tersebut selama:4 (empat) tahun ;

Hal. 70 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 6 (enam) bulan ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa oleh karena itu, untuk membayar uang pengganti sebesar: Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), jika dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda, yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun ;
7. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa fotocopy dokumen-dokumen yaitu:
 1. Surat Pengajuan SPM yang ditanda tangani oleh PPSPM (Pejabat Penandatangan SPM);
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) KPPN Wamena kepada Bank Pembayaran;
 3. Rencana Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP);
 4. Surat Permohon ke KPPN Wamena untuk Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kejaksaan Negeri Wamena;
 5. Laporan Pertanggungjawaban Bulanan bendahara Kejaksaan Negeri Wamena TA 2012 sampai dengan TA 2013;
 6. 1 (satu) bundel SK Kajari Wamena Nomor: KEP-36/T.1.16/Cu.3/12/2012 Tentang Penggantian Bendahara Pengeluaran pada Kejaksaan Negeri Wamena ditetapkan di Wamena pada Tanggal 10 Desember 2012 ditandatangani Kajari Wamena I PUTU SUARJANA, SH, MH;
 7. Dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satker (Satuan Kerja) Kejaksaan Negeri Wamen, nomor : DIPA-0453/006.01.2.01/30/2012 Tahun Anggaran 2012;
 8. Dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satker (Satuan Kerja) Kejaksaan Negeri Wamena, nomor: DIPA-006.01.2.008991/2013 Tahun Anggaran 2013;
 9. 1 (satu) rangkap dokumen surat pengantar SP-1611/WPB.30/BD.0204/2013 pengesahan Nomor SP DIPA SP-

Hal. 71 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006.01.2.008991/AG/2013 tanggal 05-12-2012 Pagu Dana
3.942.049.000,00;

10. 1 (satu) bundel Dokumen Rincian Pagu DIPA Per Akun Tahun Anggaran 2013;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013;
12. 6 (enam) lembar kuitansi honor PNPB perbulan Rp.420.000,00 dibayar dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun 2013 yang ditandatangani oleh Shally Peetom;
13. 1 (satu) lembar kuitansi honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) perbulan Rp.1.110.000,00 dibayar dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh I Putu Suarjana;
14. 1 (satu) lembar kuitansi honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perbulan Rp.930.000,00 dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh Arius Abami;
15. 1 (satu) lembar kuitansi honor Bendahara Pengeluaran bulan Maret sampai dengan Mei 2013 Rp.2.790.000,00;
16. 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Dinas Pariwisata Kab.Jaya Wijaya T.A 2013 sebesar Rp.30.000.000,00 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Nikson N,SH.MH;
17. 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Tipikor Dinas Pariwisata Kab.Jaya Wijaya T.A 2013 sebesar Rp.30.000.000,00 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Fransiska L.W,SH;
18. 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Penyidikan T.A 2013 sebesar Rp.10.000.000,00 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Aryus Bisai,SH;
19. 1 (satu) lembar kuitansi honor antar Jemput Tahanan T.A 2013 Perkara Pidum sebesar Rp.15.000.000,00 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Naman Medlama;
20. 1 (satu) lembar kuitansi honor Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara T.A 2013 sebesar Rp.15.000.000,00 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Filemon Ketaren,SH;
21. 1 (satu) lembar Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00092/KEJAKSAAN-UP/2012 tanggal 22-11-2012 sebesar Rp1.040.650.000,00 (SATU MILYAR EMPAT PULUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) Uraian

Hal. 72 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk Satker Kejaksaan Negeri Wamena;

22. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) kepada KEPALA KANWIL XXX DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN di Jayapura Nomor: B/1051/T.1.16/Cu.3/11/2012. Tanggal 19 Nopember 2012 yang ditandatangani I Putu Suarjana. SH;
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggal 19 Nopember 2012 yang ditandatangani I Putu Suarjana. SH;
24. 1 (satu) lembar Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang ditandatangani I Putu Suarjana, SH;
25. 1 (satu) lembar Rencana Kas Bulanan TA 2012 tertanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani I Putu Suarjana, SH;
26. 1 (satu) lembar Laporan realisasi Anggaran Satuan Kerja untuk semester yang berakhir 31 Desember 2012 tanggal 03 Desember 2012;
27. 1 (satu) lembar Laporan Posisi Pertanggal 31 Desember 2012 Tahun Anggaran 2012 Tanggal 3 Desember 2012;
28. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN untuk Bulan yang berakhir 31 Oktober 2012;
29. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (Surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00095/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp148.000.000,00 (SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.148.000.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
30. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00099/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp58.250.000,00 (LIMA PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.58.250.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
31. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00106/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp84.990.000,00 (DELAPAN PULUH

Hal. 73 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS RIBU SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.84.990.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
32. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00101/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp28.140.000,00 (DUA PULUH DELAPAN SERATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.28.140.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
 33. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00102/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp22.800.000,00 (DUA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.22.800.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
 34. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00103/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp16.400.000,00 (ENAM BELAS JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.16.400.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
 35. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00105/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp246.000.000,00 (DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp246.000.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012.
 36. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00104/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp152.300.000,00 (SERATUS LIMA PULUH DUA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan

Hal. 74 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUP sebesar Rp.152.300.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;

37. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00100/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp99.960.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.99.960.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
38. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00107/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp20.090.000,00 (DUA PULUH JUTA SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.20.090.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
39. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00108/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp110.440.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh rupiah) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.110.440.000,00 pengesahan atas pertanggung jawaban TUP tahun anggaran 2012;
40. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00109/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 31-12-2012 sebesar Rp40.000.000,00 (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian TUP untuk keperluan belanja barang setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp40.000.000,00 pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2012;
41. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00096/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 06-12-2012 sebesar Rp40.000.000,00 (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) Uraian Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang;
42. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00093/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012

Hal. 75 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12-11-2012 sebesar Rp18.125.000,00 (DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang;

43. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar) nomor SPM: 00092/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 12-11-2012 sebesar Rp21.500.000,00 (DUA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang;

44. 1 (satu) bundel Dokumen SPPD atas nama I PUTU SUARAJANA, SH, MH ditandatangani I PUTU SUARAJANA, SH, MH;

45. 1 (satu) lembar Kenaikan Gaji Berkala An.FIRMAN RACHMAN tanggal 01 November 2012 ditandatangani I PUTU SUARAJANA, SH, MH;

46. 1 (satu) lembar foto copian SK. CPNS An. FIRMAN RACHMAN;

47. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena tentang pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dan Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Kejaksaan Negeri Wamena Tahun Anggaran 2013;

48. Nomor Cek 397944 tanggal 4 Desember 2012 senilai Rp1.042.836.100;

49. Nomor Cek 397946 tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp69.308.550,00;

50. Nomor Cek 397949 tanggal 1 Pebruari 2013 senilai Rp100.000.000,00;

51. Nomor Cek 397950 tanggal 20 Pebruari 2013 senilai Rp24.224.200;

52. Nomor Cek 398951 tanggal 26 Pebruari 2013 senilai Rp39.998.8000

53. Nomor Cek 398952 tanggal 5 Maret 2013 senilai Rp855.381.600,;

54. Nomor Cek 398953 tanggal 29 Maret 2013 senilai Rp104.717.300,;

55. Nomor Cek 398954 tanggal 5 April 2013 senilai Rp100.000.000,00;

56. Nomor Cek 398956 tanggal 29 April 2013 senilai Rp11.622.100;

57. Nomor Cek 398957 tanggal 2 Mei 2013 senilai Rp612.332.100;

58. Cek 398958 tanggal 23 Mei 2013 senilai Rp58.614.500;

59. Nomor Cek 398960 tanggal 5 Juni 2013 senilai Rp11.622.100;

60. Nomor Cek 398961 tanggal 14 Juni 2013 senilai Rp58.614.500;

Hal. 76 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Nomor Cek 398962 tanggal 5 Juli 2013 senilai Rp70.636.050,00;
62. Nomor Cek 398965 tanggal 19 Juli 2013 senilai Rp85.017.500;
63. Nomor Cek 398966 tanggal 24 Juli 2013 senilai Rp310.700.000,00;
64. Nomor Cek 398967 tanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp80.300.000,00;
65. Nomor Cek 398968 tanggal 10 September 2013 senilai Rp42.188.400;
66. Nomor Cek 398969 tanggal 13 September 2013 senilai Rp57.070.000,00;
67. Nomor Cek 398970 tanggal 4 Oktober 2013 senilai Rp42.188.400;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Februari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Maret 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 03 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 03 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan hukum atau kebiasaan putusan-putusan pengadilan yang selalu mempertimbangkan berat ringannya Terdakwa dalam menjalankan hukuman, sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Tingkat Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura) menilai telah cukup adil dengan amar putusannya sebagaimana poin 1

Hal. 77 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas hal ini dilandasi oleh Putusan Hukum yang ada dalam masyarakat, artinya Majelis Hakim Pengadilan Negerilah yang langsung merasakan dengan keyakinannya suasana yang hidup dalam pemeriksaan perkara secara langsung;

Hakim Pengadilan Tinggi seharusnya menemukan hukum dari sisi itu juga, bukan semata-mata melihat UU tanpa memikirkan sumber hukum lamnya yaitu perasaan hukum dan keadilan dalam bermasyarakat;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Pemohon/Terdakwa FIRMAN RAHMAN sebagai Bendahara Kejaksaan Negeri Wamena, tidak pernah memiliki inisiatif dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. menyalahgunakan wewenang atau sarana sehingga mengakibatkan kerugian negara, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan ini, akan tetapi Terdakwa diangkat sebagai Bendahara oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wamena untuk menggantikan bendahara lama Selly Pettong yang selalu mangkir dari Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Wamena, namun sebagai bendahara Terdakwa, tidak pernah mengelolah keuangan Kejaksaan Negeri Wamena secara langsung/fisik, tetapi Terdakwa hanya dipermtahkan untuk membuat laporan-laporan keuangan dan administrasi keuangan Kejaksaan Negeri Wamena Tahun 2013/2014;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura mengenai lamanya pidana, lamanya pidana kurungan pengganti jika Terdakwa tidak membayar denda dan status barang bukti sehingga amarnya tidak menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Subsidair, dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta, rupiah), atau subsidair 1 (satu) tahun penjara yang dibuat berdasarkan pertimbangan tuntutan yang benar. Pemberatan pidana terhadap Terdakwa dari pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh

Hal. 78 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, berdasarkan pertimbangan adanya alasan-alasan memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang tidak dipertimbangan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yaitu bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi adalah untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat, Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memberi contoh dan teladan, serta merusak citra Pegawai Negeri sebagai aparat sipil negara, Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, dan perbuatan Terdakwa mencoreng Nama baik Institusi Kejaksaan;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena terhadap hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Yuris*, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali jika *Judex Facti* Memiliki kekurangan dalam pertimbangan hukum atau melanggar ketentuan ancaman pidana. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan secara professional;

Menimbang, bahwa namun demikian Anggota Majelis I, yaitu **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan Ketua Majelis dan Anggota Majelis II, yaitu **Dr. Salman Luthan, S.H., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dimana Anggota Majelis I. **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, berpendapat, sebagai berikut :

Bahwa keberatan kasasi Terdakwa/ Pemohon II pada halaman 10 - 64, keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena pada pokoknya, keberatan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap suatu kenyataan yang tidak menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan perbedaan penafsiran yang diperoleh dari fakta hukum persidangan

Hal. 79 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* dan bersifat penghargaan atas suatu kenyataan;

Bahwa keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Bahwa terlepas dari alasan-alasan keberatan kasasi Terdakwa, (*Judex Facti*) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dengan menyatakan bahwa unsur "Melawan hukum" yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) akan tetapi melainkan terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan khusus yaitu menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dakwaan subsidier, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur "Melawan hukum" justru berlaku umum terhadap siapa saja bagi subjek hukum yang mampu bertanggungjawab tanpa harus membedakan melawan hukum dalam keadaan khusus yaitu menyalahgunakan kewenangan yang berkaitan dengan kedudukan dan jabatan seseorang *pelaku tindak pidana korupsi* termasuk pada diri Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 Jo UU RI No.20 Tahun 2001;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas tidak dapat dibenarkan oleh karena ternyata sesuai fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum dan unsur-unsur lainnya dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku bendahara bersama-sama dengan saksi I Putu Suarjana mencairkan, membelanjakan dan menggunakan dana dari anggaran bulan Desember 2012 tidak sesuai realisasi pencairan berdasarkan jenis SPM/SP2D yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.042.770.000,00 dengan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp134.400.515,00 sehingga selisih dari yang telah dicairkan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan sebesar Rp.908.369.485,00 Bahwa untuk anggaran dari Januari - September 2013 realisasi pencairan dan pertanggungjawaban dana berdasarkan jenis SPM/SP2D seluruhnya berjumlah

Hal. 80 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.509.810.200 sedangkan pengeluaran yang yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.242.512.266,00 sehingga selisih pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.267.297.934,00 termasuk dana sebesar Rp.800.000.000,00 yang diteransfer ke rekening atas nama saksi I Putus Suarjana dan dana yang diterima Terdakwa Firman Rachman sebesar Rp210.000.000,00 digunakan untuk kepentingan pribadi,;

- Bahwa sesuai hasil perhitungan realisasi pencairan total anggaran untuk tahun 2012 dan anggaran tahun 2013 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan merupakan kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.3.175.667.419,00;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak yang sah menurut hukum telah menerima uang sejumlah Rp.210.000.000,00, dari saksi I Putu Suarjana (terdakwa dalam berkas terpisah) telah memperkaya diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa Firman Rachman atas perintah saksi I Putu Suarjana telah membuat Ganti Uang Nihil (GU Nihil) untuk mempertanggung jawabkan uang sebesar Rp.1.040.000.000,00 yang telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dengan cara membuat dokumen pertanggung jawaban secara tidak benar alias fiktif;

Bahwa dari rangkaian fakta hukum dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi I Putu Suarjana tersebut di atas, adalah perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri sebagai bendahara yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak yang sah menggunakan dana tersebut secara tidak benar menurut hukum serta bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja Jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN Jo Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) UU RI Nomor: 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri yaitu bertambahnya kekayaan atau telah menjadi kaya yaitu sebesar Rp210.000.000,00 atau orang lain yaitu saksi I Putu Suarjana sebesar-Rp800.000.000,00;

Hal. 81 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp.3.175.667.419,00;

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah cukup terpenuhi, sehingga terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) a KUHP Jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan menolak dan memperbaiki permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **FIRMAN RACHMAN** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **22 Juni 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim

Hal. 82 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd / **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**

Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd / **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001

Hal. 83 dari 83 hal. Put. No.1331 K/Pid.Sus/2015